



PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

Lebih Dekat dengan Satu Klik



"IKN SIMBOL IDENTITAS BANGSA DAN PUSAT INOVASI EKONOMI BARU"

BACA HALAMAN 2-3



**KONSER ROSSA ANOTHER
JOURNEY THE BEGINNING, IDN
PILIH SAMARINDA JADI KOTA
PERTAMA DI KALIMANTAN
BACA HALAMAN 31**

"IKN Symbol Identitas Bangsa dan Pusat Inovasi Ekonomi Baru"

SAMARINDA - Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menegaskan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah menjadi perhatian sentral pemerintah pusat sebagai simbol identitas bangsa dan tata kelola pembangunan Indonesia.

"IKN Nusantara sejak awal dirancang sebagai membuka akses ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan," kata Akmal Malik di Samarinda, Kamis (5/10/2023).

Ia menambahkan IKN Nusantara juga menjadi pusat inovasi ekonomi baru, yang bisa membawa multiplier effect distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata ke seluruh wilayah luar Jawa guna mendukung pembangunan Indonesia sentris menuju Indonesia Emas 2045.

"Kita harus bersyukur karena Kaltim akan menjadi salah satu titik bagi penyebaran kemampuan ekonomi ke wilayah Timur Indonesia," katanya.

Akmal Malik mengapresiasi langkah DPR RI yang telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.

"Kebijakan ini adalah momentum yang harus disambut dengan baik. Mari kita bersatu memajukan pembangunan melalui delapan sektor strategis, ini kan warisan dari Pak Isran Noor (mantan Gubernur Kaltim) yang sudah disepakati bersama," kata dia.



ANTARA/FANDI

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik saat diwawancara awak media.

Ia mengemukakan delapan sektor strategis tersebut adalah sektor ekonomi dan industri, logistik dan konektivitas, SDM dan ketenagakerjaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pariwisata dan ekonomi kreatif, energi dan pertambangan, ketahanan pangan serta pengelolaan sumber daya alam.

Akmal Malik juga menyampaikan di tengah-tengah tantangan global, potensi ancaman, dan kepentingan tarik-menarik ekonomi luar negeri, Indonesia mendapatkan informasi

yang memberikan angin segar bagi Indonesia dan juga Kalimantan Timur.

"Kamimengajakseluruhpemangku kepentingan di Kaltim, ayo kita menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Karena Kaltim akan menjadi salah satu penentu bagaimana Indonesia akan bertransformasi ke depan," tuturnya. (Ant/MK)

Pewarta : Arumanto
Editor : Budi Suyanto



ANTARA/HO-KEMENTERIAN PUPR

Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara.

OIKN dan France Museums Bahas Pembangunan Museum Berteknologi Futuristik di Kota Nusantara

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama France Museums membahas pembangunan museum dengan teknologi futuristik di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

"Kami ingin mengetahui beberapa hal tentang pengembangan museum terkini. Sebagai contoh, ada museum untuk melihat sejarah, tapi sekarang banyak konsep-konsep museum yang lebih masa depan. Misalkan dengan penggunaan teknologi hologram," ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/10/2023).

Bambang mengatakan kunjungan Otorita Ibu Kota Nusantara ke France Museums di Paris, Perancis antara lain untuk membahas terkait pembangunan museum di kawasan Ibu Kota Nusantara.

"Selain membahas sekadar pembangunan sebuah museum, Otorita Ibu Kota Nusantara dengan pihak France Museums juga melakukan

sharing knowledge terkait bagaimana membangun sebuah museum dengan teknologi yang futuristik," katanya.

OIKN berdiskusi banyak hal terkait museum dengan Junia Jorgji selaku Direktur Proyek Khusus France Museums dan Herve Barbaret selaku Direktur Umum France Museums.

Di dalam diskusi ini dibahas bagaimana aspek keunikan di dalam pembangunan museum mampu menjadi kunci keberhasilan. Oleh karena itu, dibahas juga terkait bagaimana membangun sebuah museum di Kawasan Ibu Kota Nusantara dengan teknologi yang futuristik, namun juga juga dapat merepresentasikan karakter dari IKN.

Direktur Proyek Khusus France Museums Junia Jorgji mengatakan bahwa ini kesempatan yang baik untuk berpikir out of the box. "Yang penting adalah, jangan mencontoh sesuatu yang sudah ada," kata Junia.

Selain itu, hal yang menjadi unsur

penting di dalam museum adalah bagaimana menciptakan teknologi yang adaptif.

Direktur Umum France Museums Herve Barbaret mengatakan, teknologi tentunya sangat cepat berubah. Teknologi yang disiapkan saat museum dibangun bisa jadi sudah berubah trennya pada saat pembukaan. Hal ini dikhawatirkan malah tidak sesuai dengan harapan pengunjung. Teknologi hanya sebagai alat.

Dengan melalui sesi diskusi antara Ibu Kota Nusantara dengan pihak France Museums, Indonesia dapat belajar dengan apa yang telah terjadi di beberapa museum di Perancis. Di mana seiring berjalannya waktu pengunjung di beberapa museum di Perancis semakin berkurang. Hal ini dikarenakan kurang dimaksimalkannya dua hal penting yaitu keunikan dan teknologi yang adaptif. (Ant/MK)

Pewartu : Suharsana Aji Sasra J C
Editor : Faisal Yuniarto



PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From ^{Rp}15.000 nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Tepung



Pisang Goreng Kaya



Teh Tarik Spirit

BEBAS PILIH MENU !

*syarat dan ketentuan berlaku

www.hotelgrandkartika.com/inspirasi



Gubernur Serahkan SK Pengangkatan PNS dan PPPK, serta Anugerahi 32 PNS Tanda Jasa Karya Satya

TARAKAN - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., Menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PNS dan PPPK Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendidikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di Aula RSUD dr. H. Jusuf SK Kota Tarakan, Jumat (6/10/2023).

Momen ini telah dinantikan oleh 277 ASN yang hari ini menerima SK pengangkatan 100 persen setelah melewati proses yang cukup panjang mulai dari seleksi penerimaan pada tahun lalu hingga sampai pada titik ini.

Selain itu, Gubernur juga menyematkan tanda jasa Satyalancana Karya Satya kepada 32 PNS Pemprov Kaltara yang telah mengabdikan diri selama 10, 20, dan 30 tahun.

Atas nama pribadi dan Pemprov Kaltara, Gubernur mengucapkan selamat atas diangkatnya ASN di

lingkungan Pemrov Kaltara.

Zainal menekankan agar ASN yang baru saja diangkat selalu bersyukur dalam bentuk semangat bekerja dan mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab untuk mengabdikan kepada negara dan masyarakat.

"Saudara sekalian telah melewati proses panjang, maka patut bagi Saudara untuk bersyukur dalam bentuk meningkatkan semangat bekerja," kata Gubernur saat menyampaikan sambutan.

Gubernur juga mengingatkan kepada ASN agar selalu meningkatkan profesionalitas, kualitas, dan kapasitas untuk merubah paradigma masyarakat terhadap birokrasi dan layanan publik.

"Saya berpesan kepada Saudara untuk menjaga citra positif dengan bekerja sebaik-baiknya," lanjut Zainal Paliwang.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Gubernur kembali mengingatkan agar ASN di Kaltara agar tetap bekerja dengan penuh kejujuran serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

"Besarnya harapan Saya untuk dapat bekerja sama dengan ASN muda yang cakap, tekun, dan penuh tanggung jawab," Zainal menutup sambutannya.

Hadir mendampingi Gubernur pada kegiatan ini yaitu Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Bustan, S.E., M.Si., Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga, Burhanudin, S.Sos., M.Si., dan Plt. Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Andi Amriampa, S.Sos., M.Si., serta Plt. Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK, dr. Ario Gatot Kertarto. (dkisp)



ISTIMEWA

Kepala Bidang P3K Distransnaker Kukar, Syarifah Rosita (kiri).

Akhir Oktober, Disnakertrans Kukar Gelar Job Fair di Loa Janan

TENGGARONG-Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Kutai Kartanegara, berencana menggelar Job Fair. Dengan menggandeng Bursa Kerja Khusus (BKK) dari 4 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Loa Janan.

Kegiatan itu dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, sejak tanggal 21-22 Oktober 2023 mendatang dan akan mempertemukan para alumni dari 4 SMK dari Loa Janan. Masing-masing dari SMK Bhakti, SMK Muhammadiyah, SMK Purwajaya dan SMK Prasetya Budi Luhur dengan sejumlah perusahaan setempat.

"Job Fair tersebut akan mempermudah perusahaan dengan alumni SMK tersebut," jelas Kepala Bidang Pembinaan, Pemberdayaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (P3K) Disnakertrans Kukar, Syarifah Rosita.

Syarifah Rosita menyebut hingga saat ini belum bisa dipastikan akan ada berapa banyak lowongan pekerjaan yang disediakan. Sebab masih dalam tahap proses pendataan perusahaan yang akan dijadwalkan mengikuti agenda Job Fair. "Belum mengetahui berapa banyak, tadi baru mengajukan proposal ke perusahaan

perusahaan untuk ikut serta dalam Job Fair," lanjutnya.

Job Fair ini diharapkan bisa menyerap banyak tenaga kerja putra-putri alumni dari lulusan 4 SMK tersebut. Bagi para alumni yang ingin mendaftar nantinya diarahkan untuk membuat kartu kuning atau kartu pencari kerja yang diterbitkan oleh 4 SMK yang sudah terbentuk BKK dan menjadi mitra Disnakertrans Kukar tersebut. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



TAF

TIRTONEGORO ART FESTIVAL
PRESENT

GRATIS

Pendaftaran lomba tanpa dipungut biaya

NARAHUBUNG
0857-5259-1015
(CANA)

FESTIVALPESISIRKALTIM
RUMAHSENIBUDAYA.TIRTONEGORO

TOTAL HADIAH
50 JUTA

FESTIVAL PESISIR

13-15
OKTOBER 2023



PANTAI PANRITA LOPI, MUARA BADAK

LOMBA TARI PESISIR | PERTUNJUKAN SENI
& BUDAYA | LOMBA BACA PUISI | LOMBA DOMINO
LUKIS KANVAS | JALAN SANTAI

PERMAINAN TRADISIONAL | PEMUTARAN FILM | GELAR UMKM | PESISIR COFFEE |
TALKSHOW PEMUDA PESISIR | PARADE MUSIK | PENYEMATAN DUTA PESISIR | SENI OUTBOUND
PESISIR | DEMO MASAK | LOMBA LARI | VOLLEY PANTAI | PEMUDA INOVATIF | BOLA PANTAI

BERSAMA KOMUNITAS
ANAK NELAYAN

RAKANG

(Pembuatan alat tradisional
tangkap kepiting)

BANDENG

(Tutorial cabut
duri Bandeng)

IKAN SEGAR

(Mengenali ikan segar)

IJAR PESISIR

(Edukasi tangkap ikan
jaring di pesisir)



Pemkab Kukar Hadirkan Festival Pesisir di Kecamatan Muara Badak

TENGGARONG - Setelah Kukar-Land Festival 2023, sukses menghentak Kalimantan. Kini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) siap meluncurkan festival lainnya, hingga akhir tahun 2023 ini. Yakni dengan menyiapkan Festival Pesisir 2023, yang terfokus di Kecamatan Muara Badak, tepatnya di Pantai Panrita Lopi.

Festival rencananya akan digelar pada pekan kedua Oktober, yakni selama 3 hari. Semenjak tanggal 13-15 Oktober 2023, dengan menggandeng Tirtonegoro Art Festival. Menjadikan Festival Pesisir menjadi event bertaraf nasional.

Sebanyak 6 kegiatan festival ala pantai yang diselenggarakan. Di antaranya, Lomba Tari Pesisir, Pertunjukan Seni dan Budaya, Lomba Baca Puisi, Lomba Domino, Lukis Kanvas dan Jalan Santai.

Di dalamnya pun juga akan dilak-

sanakan permainan tradisional, pemutaran film, gelar UMKM, pesisir coffee, Talkshow Pemuda Pesisir, parade musik. Juga ada outbond pesisir, demo masak, lomba lari, voli pantai, pemuda inovatif, sepak bola pantai dan penyematan Duta Pesisir.

Selain itu juga ada pemaparan dari Komunitas Anak Nelayan, mengenai cara membuat alat tradisional menangkap kepiting "Rakang". Tutorial mencabut duri Ikan Bandeng, mengenali ciri-ciri ikan segar dan cara menangkap ikan "Ijar Pesisir".

"Ya, Festival Pesisir ini kegiatan untuk memberikan edukasi tentang pariwisata, serta edukasi seni dan budaya di Kaltim," ucap Rahmat Azazi, penyelenggara Festival Pesisir 2023.

Kegiatan ini pun kembali digelar, lantaran adanya dukungan dari pihak Pemkab Kukar yang lagi konsentrasi untuk mendukung event-event garapan pemuda. Dimana, sebelumnya

dukungan datang dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

"Selain dengan Pemkab Kukar, kita juga bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti pengelola Pantai Panrita Lopi yang telah menyediakan tempat," jelasnya.

Terpisah, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, pun menyambut baik event garapan Tirtonegoro Art Festival ini. Karena memang melibatkan para pelaku usaha kreatif dan UMKM. Menjadi komitmen pemkab untuk mendukung aktivitas positif yang digelar pemuda-pemuda Kukar.

"Kapan lagi ada acara seperti ini, bisa menikmati parade musik, pertunjukkan kesenian, sekaligus liburan di pantai. Makanya, ayo kita ramaikan event ini," pungkasnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari

APBD-P Kukar 2023, Kecamatan Sebulu Kembali Dapat Kucuran Rp 21 Miliar untuk Infrastruktur

TENGGARONG - Proses pembangunan di Kecamatan Sebulu, Kutai Kartanegara (Kukar) terus berjalan hingga akhir tahun 2023 ini. Terutamanya untuk pembangunan infrastruktur jalan. Camat Sebulu, Edy Fahrudin, mengungkapkan bahwa anggaran tersebut untuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara merata di 14 desa.

Edy melanjutkan, total kucuran anggaran tambahan yang masuk di Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kukar, senilai Rp 21 miliar. Nantinya akan meliputi pembangunan, peningkatan dan perbaikan akses jalan antar wilayah di Kecamatan Sebulu. Namun Edy tidak secara mendetail panjang jalan yang akan dikerjakan.

"Tujuannya lagi-lagi ya untuk memudahkan masyarakat dalam hal mobilitas barang dan jasa, biar sembako enak," ungkap Edy, Jumat (6/10/2023).

Edy menyebut, anggaran yang masuk di Kecamatan Sebulu ini berasal dari berbagai sumber. Dan dikerjakan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, seperti Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kukar dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar.

"Kalau rata-rata hampir semua jalan di kecamatan kita klir, bahkan nanti juga ada pembangunan jalan lingkungan yang ditopang melalui APBDes," tutupnya. (adv)



Camat Sebulu, Edy Fahrudin.

ISTIMEWA

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Suasana seminar terkait ketersediaan air bersih untuk IKN yang diselenggarakan BRIDA Kukar.

Jadi Penyangga IKN, BRIDA Kukar Lakukan Kajian Pemenuhan Air Bersih

TENGGARONG - Badan Riset dan Inovasi Daerah Kutai Kartanegara (BRIDA Kukar) menggelar penelitian dan melakukan kajian, terkait ketersediaan air bersih. Di mana Kukar merupakan daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), bersama Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Dijelaskan Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi dan Pembangunan Daerah BRIDA Kukar, Karno, seminar sendiri diawali dengan seminar pendahuluan untuk mengkaji metodologi penelitian. Dilaksanakan di ruang Kantor BRIDA

Kukar, pada Senin, 2 Oktober 2023 lalu.

"Kegiatan penelitian ini ingin memprediksi kebutuhan air di daerah sekitar IKN," jelas Karno.

Penelitian ini pun dianggap penting, lantaran kurang dari satu tahun lagi IKN segera diresmikan. Sedangkan Kukar yang berbatasan langsung dengan IKN, akan terdampak dengan kepindahan ibu kota negara tersebut. Yakni adanya indikasi kepindahan penduduk yang masif pada sejumlah wilayah perbatasan IKN dan Kukar. Membuat nantinya kebutuhan air baku oleh mas-

arakat turut meningkat.

"Terutama bagi wilayah yang berdekatan langsung dengan IKN, seperti Kecamatan Sangasanga, Loa Kulu dan Loa Janan," sabung pria tersebut. Apa lagi air menjadi kebutuhan primer manusia untuk dipergunakan setiap hari. "Dengan adanya IKN, pasti ada migrasi penduduk. Sehingga, berkaitan dengan penyediaan air bersih harus kita persiapkan," pungkasnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari

Koran DIGITAL
MEDIA KALTIM.com
Lebih Dekat dengan Satu Klik

<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0811 5405 033

media_kaltim mediakaltimdotcom mediakaltim.com media kaltim



ISTIMEWA

Sesi foto bersama Disnakertrans Kekar dan 2 SMK penerima BKK.

2 SMK di Kekar Terima BKK dari Disnakertrans

TENGGARONG - Sebanyak 2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kutai Kartanegara (Kekar), menerima surat tanda daftar Bursa Kerja Khusus (BKK) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kekar. Diserahkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertrans Kekar, Muhammad Hatta.

Penyerahan yang dilaksanakan pada Kamis (5/10/2023) lalu ini, diterima oleh kepala SMKN 1 Samboja dan kepala SMKN 1 Muara Jawa. Sebelumnya ada sebanyak 8 SMK yang meminta tanda daftar untuk BKK. BKK inilah yang menjadi lembaga yang dibentuk di SMK, sebagai unit pelaksana memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja.

Kepala SMK membentuk supaya anak didik setelah selesai menempuh pendidikan, lulus sekolah diarahkan ke pekerjaan nanti. "Sekolah menggaet perusahaan yang ada di sekitar

lembaga pendidikan SMK yang ada di masing-masing kecamatan," jelas Hatta, Jumat (6/10/2023).

Hal ini juga mengikuti adanya perbup pelimpahan wewenang ke kecamatan, sehingga dengan adanya surat terdaftar ini maka SMK tersebut diperbolehkan membuka pelayanan kartu kuning atau kartu pencari kerja (AK-1).

Sementara itu Kepala Bidang Pembinaan, Pemberdayaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (P3K) Disnakertrans Kekar, Syarifah Rosita menjelaskan para pencari kerja yang berada dari kecamatan-kecamatan jauh itu tidak harus lagi jauh ke Kantor Disnakertrans Kekar cukup melalui BKK di SMK tersebut.

"Jadi alumninya khusus SMK tersebut bisa didata, tapi tidak melayani SMA, karena bursa kerja khusus ini untuk SMK," ucapnya.

Dirinya menyebut surat tanda daftar yang diberikan juga akan dilakukan revisi. Jika kemudian hari ada perubahan atau pergantian kepala sekolah. "Harus lapor ke kami, maka surat tadi akan kami rubah lagi," tambahnya.

Kepala SMK Negeri 1 Samboja, Syafril usai menerima surat tanda daftar ini berharap bisa membantu alumni sekolahnya untuk mempercepat memperoleh pekerjaan.

"Insya Allah dengan diterbitkannya surat tanda daftar, maka SMK Negeri 1 Samboja bisa mengeluarkan kartu kuning, sehingga penelusuran bisa lebih mudah. Karena kami sudah bisa melacak yang kerja atau tidak," pungkasnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



Pembangunan drainase di Jalan Diponegoro Kecamatan Tanjung Redeb.

Sambut Baik Pembangunan Drainase, Sakirman: Semoga Bisa Atasi Banjir

TANJUNG REDEB - Pembangunan dan peningkatan drainase di beberapa titik perkotaan di Kabupaten Berau masih berproses tahun ini. Yang mana utamanya untuk mengatasi genangan air hingga banjir yang masih terjadi di wilayah perkotaan Tanjung Redeb.

Hal itu disambut baik oleh Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman. Hanya saja dirinya menyarankan, selain fungsi drainase untuk irigasi tentunya keindahan kota pun harus dijaga. Sakirman juga mendorong pembangunan drainase dapat dituntaskan pun tidak ada yang mangkrak.

“Jaringan drainase yang masih diproses ada dua, ada yang langsung pada badan jalan dan langsung pada

trottoar, semoga segera dituntaskan,” ucapnya.

Namun, yang perlu diperhatikan yaitu titik-titik banjir yang ada di daerah perkotaan. Diakuinya, pemasangan drainase pada jalur irigasi yang rawan banjir sebagian telah terpasang. “Semoga beberapa titik banjir yang ada di Kabupaten Berau dapat teratasi,” harapnya.

Menurutnya, jangan sampai hanya sebatas pemasangan U-gutter (beton saluran) saja tapi tidak dituntaskan secara menyeluruh di bagian atasnya.

“Jangan hanya sebagian saja yang dikeramik dan sebagiannya tidak, jika seperti itu maka keindahan kotanya tidak didapat,” tuturnya.

Terkait pemasangan drainase yang berada di sekitar GOR Pemuda yang terlihat merusak jalan. Dirinya menjelaskan pengerjaannya masih berjalan dan belum selesai. Semoga ketika telah selesai bisa diperbaiki jalan yang telah rusak akibat pemasangan drainase tersebut.

“Jangan hanya irigasinya yang ditingkatkan, pesangan keramik, penanaman pohon, dan lampu penerangan bisa dipasang. Mengingat jalan tersebut termasuk pintu masuk dan wajah bagi Kabupaten Berau,” tandasnya. (Adv/Mnz)

Pewarta: Amnil Izza

Editor : Nicha Ratnasari

Berau Akan Dapat DBH Sawit, Elita Tegaskan Harus Kembali ke Masyarakat

TANJUNG REDEB - Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina menyebut, Kabupaten Berau bakal mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) dari Provinsi Kaltim. Lantaran Berau memiliki wilayah dengan sektor perkebunan sawit yang cukup luas.

Karenanya dirinya pun meminta percepatan penyaluran pendanaan tersebut bisa juga dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Berau.

Diharapkan, pembanguan dana bagi hasil tak hanya dari sektor kehutanan, namun juga dari sektor yang prospek seperti perkebunan sawit. Sehingga, diharapkan Berau juga dapat. Bukan hanya menjadi aktivitas lokasi saja selama ini. "Karena aktivitasnya kan di daerah kita, masa kita kebagian yang tidak enak nya saja," tegasnya.

Dirinya berharap, hasil tersebut nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga, masyarakat juga merasakan dampak adanya perkebunan sawit dengan timbal balik dapatnya DBH SDA. "Kemudian harapan kita dari DBH ini kembali ke masyarakat," ujarnya.

Diketahui, Kaltim akan mendapat dana triliunan rupiah dari DBH SDA. Tahun ini, pos penerimaan baru yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah penghasil sawit dan mineral batu bara (minerba) mencapai Rp 400 hingga Rp 700 miliar. Itu baru pencairan tahap 1.



Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina

Agar anggaran yang diterima segera dibagi peruntukannya, Gubernur Kaltim Isran Noor meminta pemerintah kabupaten/kota untuk mempersiapkan payung hukumnya. (adv/dez)

Suriadi Dorong Eksekutif Optimalkan Objek Pajak dan Retribusi



Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriadi Marzuki

TANJUNG REDEB - Objek pajak dan retribusi diminta Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriadi Marzuki dioptimalkan pemerintah. Hal itu agar roda perekonomian menjadi lebih kuat.

Dia mengatakan, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Karena itu, Pemkab Berau perlu mencari sumber pendapatan alternatif demi menjaga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kita harus mencari cara agar PAD Berau dapat meningkat. Salah satu langkahnya adalah dengan mengoptimalkan objek pajak dan menggali potensi daerah yang dapat meningkatkan PAD," jelasnya.

Menurut Suriadi, saat ini peluang yang ada dalam pemungutan pajak di Berau masih terbuka lebar. Banyak objek pajak dan retribusi yang perlu dimaksimalkan potensinya, seperti pajak hotel, pajak reklame, dan pajak restoran.

"Pemkab dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan PAD.

Agar objek pajak dan retribusi yang belum dioptimalkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap PAD," lanjut Suriadi.

Dirinya juga meminta pihak terkait untuk berkolaborasi dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Dengan kesadaran masyarakat yang tinggi, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sehingga PAD Berau juga semakin bertambah.

"Dengan meningkatkan PAD, pemerintah daerah dapat lebih leluasa mengalokasikan anggaran untuk bidang yang sangat dibutuhkan, seperti sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan," tuturnya.

Diharapkan dengan adanya langkah ini, perekonomian daerah Berau akan semakin kuat dan berdampak positif bagi masyarakatnya. Dirinya optimis bahwa dengan kerja sama yang baik antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, objek pajak dapat dioptimalkan sehingga PAD dapat meningkat secara signifikan. (adv/dez)



Ketua DPRD Berau, Madri Pani

Jangan Ada Diskriminasi Pendidikan, Madri: Semua Anak Berhak Sekolah

TANJUNG REDEB – Dengan APBD Berau yang mencapai Rp 5 triliun, Ketua DPRD Berau, Madri Pani menegaskan jangan sampai terjadi diskriminasi pendidikan di Kabupaten Berau. Terutama antara daerah perkotaan dan perkampungan.

Adapun nggaran pendidikan dianggarkan sebanyak 20 persen dari APBD Berau. Momen ini bisa dimanfaatkan dengan mengembangkan kualitas pendidikan di Kabupaten Berau.

“Contohnya dengan memberikan fasilitas kepada guru sebagai penunjang pendidikan dan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah ditingkatkan,” tuturnya.

Pun pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang tidak mampu harus terus dilakukan, meskipun saat ini sekolah gratis. Namun untuk penunjang lainnya masih tetap membayar. Tidak semua, orangtua mampu untuk membelikan seragam anaknya, maupun buku. Hal inilah

yang diminta Madri agar terus menjadi perhatian serius bagi OPD terkait.

Madri menilai pendidikan sangat penting bagi bangsa dalam pembangunan daerah kedepannya. Pendidikan modal dasar bagi penerus bangsa, dalam menjalankan, mengamati, dan mengarahkan roda pemerintahan.

“Peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Berau jangan sampai dibedakan. Untuk mendukung hal itu, pendataan penting, untuk memetakan, mana yang layak dapat bantuan dan tidak,” tegasnya.

Madri meminta peran OPD terkait untuk melakukan pendataan terhadap sekolah yang ada di Berau baik TK, SD, SMP maupun SMA/SMK, agar penerimaan anak untuk masuk kejenjang pendidikan tidak ada yang ditolak, dengan alasan kuota penuh. “Jangan sampai kejadian-kejadian seperti itu terulang kembali,” ucapnya.

Madri juga memusatkan perhatiannya kepada anak-anak yang putus

sekolah. Dirinya meminta Pemkab Berau agar melakukan upaya agar anak-anak yang putus sekolah bisa mendapatkan ijazah untuk bekal dimasa depan.

“Jangan sampai, mereka ini hilang kesempatan, karena masalah ijazah,” pesannya.

Ia menilai, tidak ada salahnya membuka data, berapa warga Berau yang mengikuti pendidikan non formal tersebut. Karena, bisa dijadikan acuan untuk merumus pendidikan yang menyenangkan. Ia meminta instansi terkait juga bisa jemput bola, terhadap anak bermasalah hukum (ABH), agar bisa mendapatkan ijazah.

“Saya tidak mau tahu soal kendala. Saya hanya ingin, anak-anak ini mendapatkan kesempatan yang sama,” tutupnya. **(Adv/Mnz)**

Pewarta: Amnil Izza

Editor : Nicha Ratnasari

Setujui Raperda Pengarusutamaan Gender, Optimalkan Peran Perempuan dalam Pembangunan



Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong

TANJUNGREDEB - Raperda Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan akhirnya disetujui legislator untuk ditetapkan sebagai Perda Berau tahun 2023. Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong menyebut, akhirnya Berau dapat mengimplementasikan program pusat tersebut, yang mana sebelumnya tidak bisa dilaksanakan lantaran belum ada regulasinya.

Dikatakan Peri, perda itu dilatarbelakangi oleh adanya keterbatasan daerah yang tidak bisa menjalankan program-program pusat. "Kemarin itu ada program-program dari pusat yang tidak bisa kita laksanakan di Kabupaten Berau, ketika belum adanya perda dalam pemberdayaan gender," katanya, Jumat (6/10/2023).

Melihat ada peluang positif terhadap kesetaraan gender. Sehingga, dalam hal ini peran wanita benar-benar diutamakan dan dapat lebih berperan aktif.

Dalam hal ini, peran wanita lebih dioptimalkan dalam berbagai bidang. Seperti halnya, kondisi nyata di lingkungan Kabupaten Berau sendiri telah menerapkan kesetaraan gender. Yang menurutnya sudah berjalan sesuai peraturan berlaku. "Pengarusutamaan gender itu lebih menitik beratkan pada kesetaraan dalam jenjang karir," ujarnya.

"Untuk di lingkungan Berau sendiri, kenyataannya bupati kita kan perempuan, dan juga Kepala Dinas juga ada yang dari kaum perempuan," imbuhnya. (Adv/Mnz)

Pewarta: Amnil Izza
Editor : Nicha Ratnasari

Wendy Desak Pemkab Tuntaskan Jalan Freeway

TANJUNG REDEB - Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya mendesak pemerintah untuk menuntaskan pembangunan Jalan Ring Road, Kelurahan Gunung Panjaj yang kini mangkrak.

Dia membeberkan, Pengerjaan pembangunan Jalan Ring Road dilakukan sejak masa jabatan Bupati Makmur HAPK. Tetapi hingga kini, proyek tersebut belum tersambung dengan jalan utama. "Sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. Padahal anggaran yang dikucurkan cukup besar," ungkapnya.

Politikus NasDem ini menilai, anggaran besar tersebut sangat disayangkan jika terhenti, apalagi jika jalan tersebut selesai dikerjakan bisa memecah kepadatan arus lalu lintas di kota. "Jangan sampai karena adanya kepentingan dari pihak lain, proyek pembangunan jalan ini terlupakan," tegasnya.

Dirinya berharap, pembangunan jalan tersebut bisa diteruskan, mengingat anggaran yang dikucurkan cukup



Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya

besar. Ditambah pembebasan lahan yang belum tuntas, tentunya akan menambah masalah nantinya. "Ini juga harus menjadi fokus utama kita.

Dikhawatirkan jika penduduk makin padat, sementara lahannya bermasalah karena proyek yang mangkrak," pungkasnya. (adv/dez)

Cegah Perundungan di Sekolah, Legislator Imbau Guru Aktif Lakukan Penyuluhan

TANJUNG REDEB - Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Rudi Mangunsong menyambut baik upaya sosialisasi pencegahan yang dilakukan OPD terkait untuk mencegah terjadinya kasus perundungan (bully) di satuan pendidikan, mulai SD hingga SMA se-Kabupaten Berau.

Dirinya juga mengimbau kepada semua kepala sekolah dan guru untuk aktif melakukan pengawasan. Dengan cara memberikan materi norma-norma perilaku sosial yang baik dan benar. "Materi-materi itu bagus diberikan sebelum kegiatan pembelajaran di mulai pada pagi hari," ucapnya Jumat (6/10/2023).

Meski peran guru dan kepala sekolah bersifat terbatas, menurut Rudi dengan sudah ada metode kurikulum merdeka yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Maka, ia pun



Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau Rudi Mangunsong

mengimbau kepada orangtua harus aktif di rumah dalam membimbing tentang etika berkomunikasi.

"Perilaku budi pekerti akhlak itu ha-

rus dimaksimalkan oleh orang tua di rumah juga dalam mengawasi karakter anak sebelum hidup bersosial dengan masyarakat," imbuhnya.

"Karena pendidikan karakter anak awalmulaterbangundarilingkungannya di rumah yaitu kedua orangtua harus peran aktif mewujudkan hal tersebut," sambungnya.

Kendati demikian, pihaknya sangat mendukung jika benar ada kasus pertama bully atau perundungan hingga kekerasan fisik oleh guru kepada siswa diselesaikan melalui ranah hukum. "Karena kita tidak ingin kasus ini bakal terus berkelanjutan. Maka ya wajib hukumnya tindak tegas sesuai peraturan undang-undang yang berlaku," pungkasnya. (Adv/Mnz)

Pewarta: Amnil Izza

Editor : Nicha Ratnasari

Syarifatul Respons Positif Rencana Pemasangan Hydrant di Kawasan Padat Pemukiman

TANJUNG REDEB - Adanya rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk memasang hydrant di kawasan padat pemukiman direspons positif Sekretaris Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.

Ia mengaku, mendukung penuh wacana tersebut. Pasalnya, hydrant akan sangat bermanfaat jika sewaktu-waktu terjadi bencana kebakaran.

"Kita tidak mau kejadian yang sudah terjadi, terulang kembali. Maka dari itu, rencana pemasangan hydrant ini bisa jadi solusi," ungkapny.

Ia menyebut, pemasangan hydrant dapat bermanfaat untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran. "Jadi masyarakat bisa menyambungkan selang air, sambil menunggu pemadam kebakaran datang ke lokasi," terangnya.

Politikus Golongan Karya (Golkar) ini menegaskan bahwa pihaknya di DPRD Berau siap mendukung pemasangan hydrant tersebut. Terlebih hal itu dapat bermanfaat untuk masyarakat.

"Ini suatu wacana baik yang harus didukung. Apalagi kita ketahui di wilayah Tanjung Redeb banyak gang sempit serta padat pemukiman," katanya.

Kendati demikian, Syarifatul mendorong pemerintah untuk memperhatikan suatu hal yang berkaitan dengan penanganan bencana.

"Itu harus didukung penuh, karena kita tidak tahu kapan terjadinya bencana. Maka dari itu lebih baik sedia payung sebelum hujan," pungkasnya. (adv/dez)



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah

Keraton Direvitalisasi, Saga Nilai Bisa Tarik Wisatawan



Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga

TANJUNG REDEB – Adanya revitalisasi di bangunan bersejarah yang dilakukan pemerintah diapresiasi Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga. Dia menilai, revitalisasi yang dilakukan di Keraton Sambaliung dan Museum Batiwakkal Gunung Tabur itu merupakan suatu langkah yang tepat.

“Pengerjaan harus maksimal dan hasilnya bisa dinikmati masyarakat, terlebih anggaran yang digelontorkan untuk revitalisasi tersebut sekitar Rp 3,5 miliar,” katanya.

Dirinya mengaku mengapresiasi kegiatan positif tersebut. Terlebih dengan dilakukannya revitalisasi, menurutnya dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. “Hal ini menurut saya sebagai upaya pemerintah menarik wisatawan lokal maupun luar untuk berkunjung ke bangunan bersejarah yang ada,” tuturnya.

Saga mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan penataan dan membenahi fasilitas yang ada, tujuannya agar wisatawan yang berkunjung merasa nyaman.

“Kalau fasilitasnya mumpuni, maka wisatawan mau berkunjung untuk mengetahui sejarah dari keraton dan museum tersebut yang juga sejarah Kabupaten Berau,” terangnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini meminta agar tempat wisata yang ada di Bumi Batiwakkal mendapatkan perhatian lebih. Khususnya kepada fasilitas yang ada di tempat wisata tersebut.

“Selain fasilitas yang ada, akses menuju ke tempat wisatanya juga perlu diperhatikan, sehingga minat wisatawan bisa tinggi untuk berkunjung,” tandasnya. (adv/dez)





SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN

TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel

GUARANTEE PALING HEMAT GUARANTEE

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088








MERCURE

HOTEL

SAMARINDA

GASTRONOMY PACKAGE

Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 24 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 100 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:

@mercure_samarinda 0811 - 551 - 6000

all.accor.com



Bahasa Inggris Bakal Jadi Mapel Wajib di Jenjang SD, Parlindungan: Bahasa Nasional Lebih Wajib

BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan menilai rencana pemerintah mewajibkan mata pelajaran Bahasa Inggris di tingkat SD sudah berlebihan. Hal itu bakal menyulitkan bagi anak usia sekolah dasar di tingkat daerah. Berbeda dengan sekolah yang sudah maju dan siswanya memiliki fasilitas pendukung yang memadai.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Parlindungan Sihotang mengatakan, dirinya sudah mendengar wacana Bahasa Inggris menjadi pelajaran wajib di tahun depan. Ia menilai seharusnya mata pelajaran bahasa asing hanya bersifat sebagai tambahan. Karena bahasa nasional yang wajib menjadi pegangan utama bagi pelajar sejak tingkat dasar.

"Kalau ini wajib sebagai pengantar pelajaran di tingkat SD, saya pikir ini berlebihan. Bagaimanapun kita punya bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Bangsa kita berbahasa Indonesia. Itu kan ciri khas kita," ujarnya, Jumat (6/10/2023).

Selain itu menurut Parlindungan, penggunaan bahasa asing juga harus mempertimbangkan kemampuan orangtua. Karena pembelajaran di sekolah tetap memerlukan dukungan dari rumah. Padahal tidak banyak para orangtua yang bisa berbahasa Inggris. Mereka biasa menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan anaknya.

"Bagaimanapun kita punya bahasa nasional. Kapan lagi kita bangga sebagai warga negara kalau kita tidak pakai bahasa kita sendiri. Dan lagi, apa semua orang tua mampu membantu anaknya berbahasa Inggris," jelasnya.

Parlindungan berharap pemerintah mempertimbangkan ulang ke-

bijakan mewajibkan bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar. Meski para tenaga pendidik sedang mengikuti pelatihan agar dapat meningkatkan kapasitas dalam memenuhi kebutuhan di sekolah. Termasuk membuka formasi calon PNS untuk guru bahasa Inggris.

"Masyarakat kita ini bahasa Indonesia saja masih bercampur-campur

daerah. Saya pikir ini dulu kita perbaiki. Bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Meski tidak harus baku," tutupnya. **(ADV/DPRD-Balikpapan/Bom)**

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Parlindungan Sihotang



Kepala BKPSDM Kota Bontang Sudi Priyanto, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Hj. Aji Erlynawati, MT dan Kepala Bidang PKMF BPSDM Kaltim Rina Kusharyanti, S.STP, MM. Sesi Foto bersama peserta.

160 PPPK Ikuti Orientasi BPSDM Kaltim

SAMARINDA – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang telah berhasil menggelar Orientasi 160 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

“Hari ini (kemarin, red) telah dilaksanakan penutupan Orientasi PPPK dari 4 angkatan, terdiri dari 160 PPPK dari pemerintah kota Bontang, kegiatan ini hasil dari kerjasama antara BPSDM Kaltim dan BKPSDM Kota Bontang,” ujar Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Mana-

jerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti.

160 orang tersebut terbagi dari 4 angkatan yakni angkatan 68, 69, 70 dan 71. Setiap angkatan terdiri dari 40 orang PPPK, semua mengikuti orientasi pada 2 - 5 Oktober 2023 di Kantor BPSDM secara tatap muka atau klasikal dan para peserta menginap selama 3 hari di Asrama yang ada di kompleks perkantoran BPSDM Kaltim, Jalan HM Rifadin Samarinda Seberang.

Rina berharap semua ilmu yang telah didapat pada orientasi PPPK kali ini mampu diterapkan secara baik oleh 160 PPPK angkatan 68, 69, 70 dan 71.

“Semoga para peserta bisa mema-

hami tugas dan peran serta fungsi dari PPPK itu sendiri,” pungkasnya.

Acara yang sebelumnya dibuka Gubernur Kaltim Isran Noor Jumat (29/9/2023) lalu di Hotel Mercure Samarinda, secara resmi ditutup Sekretaris Daerah Kota Bontang, Hj. Aji Erlynawati, MT, di Aula Utama Kantor BPSDM Kaltim Jalan HM Rifadin Samarinda Seberang pada Kamis (5/10/2023).

Dalam acara penutupan hadir pula Kepala BKPSDM Kota Bontang Sudi Priyanto. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala BKPSDM Kota Bontang Sudi Priyanto (kiri), Sekretaris Daerah Kota Bontang, Hj. Aji Erlynawati, MT dan Kepala Bidang PKMF BPSDM Kaltim Rina Kusharyanti, S.STP, MM.

BPSDM Kaltim dan BKPSDM Kota Bontang Sukses Gelar Orientasi PPPK untuk 4 Angkatan

SAMARINDA – Demi menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) gelar Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, angkatan 68, 69, 70, dan 71.

Acara yang sebelumnya dibuka Gubernur Kaltim Isran Noor Jumat (29/9/2023) lalu, Kamis (5/20/2023) secara resmi ditutup Sekretaris Daerah Kota Bontang, Hj. Aji Erlynawati,

MT, di Aula Utama Kantor BPSDM Kaltim Jalan HM Rifadin, Samarinda Seberang.

Turut hadir pada agenda penutupan, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti mewakili Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, Kepala BKPSDM Kota Bontang Sudi Priyanto.

Kepala Bidang PKMF BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti, menyebutkan pelaksanaan Orientasi PPPK ini hasil kerja sama antara BPSDM Kaltim dan BKPSDM Kota Bontang.

"Hari ini, telah dilaksanakan penutupan Orientasi PPPK dari 4 angkatan,

dari pemerintah kota Bontang, kegiatan ini hasil dari kerjasama kami dengan BKPSDM Kota Bontang," ujarnya.

Dengan ditutupnya acara ini Rina berharap semoga peserta Orientasi PPPK Kota Bontang ini memahami peran tugas dan fungsi sebagai ASN PPPK.

"Semoga dapat lebih memahami peran dan fungsi ditempat kerja dapat lebih memahami SOPK dapat lebih memahami tugas PPPK yang merupakan ASN Pemkot Bontang," tutupnya. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala BPSDM Kaltim Dra Nina Dewi MAP

Ikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Kepala BPSDM Kaltim Masuk 10 Besar dengan Nilai Sangat Memuaskan

SAMARINDA - Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Samarinda, menggelar Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II Angkatan 12 tahun 2023 yang digelar, Kamis (5/10/2023) di ruang auditorium Kantor Puslatbang KDOD LAN RI Samarinda.

PKN ke-12 tahun 2023 ini diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari lembaga pemerintahan pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota, diantaranya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pemerintahan provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kubar, Kabupaten Kukar, Kabupaten Kutim, Kabupaten Paser, Kabupaten

Berau, Kabupaten Mahulu, Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tana Tidung.

Tampil sebagai perwakilan Pemprov Kaltim, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Kaltim Dra Nina Dewi MAP, disebutkan sebagai salah satu peserta yang masuk dalam 10 besar dengan kualifikasi sangat memuaskan

Pelepasan peserta PKN dilakukan oleh Kepala LAN RI Samarinda, Adi Suryanto, yang turut dihadiri Kepala Puslatbang KDOD LAN RI Samarinda, Muhammad Aswad dan juga oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik secara virtual.

Akmal Malik mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada para peserta PKN tingkat

II angkatan 12 yang telah mengikuti pelatihan selama 4 bulan.

"Selamat kepada seluruh peserta, ini adalah capaian yang luar biasa dan saya sangat bangga melihat semangat dedikasi dan komitmen selama pelatihan ini" ujar Akmal Malik

Pj Gubernur Kaltim ini juga mengatakan PKN merupakan wadah yang sangat penting dalam mengembangkan potensi kepemimpinan para kader terbaik bangsa.

"Dan melalui pelatihan ini juga telah memberikan wawasan pengetahuan yang sangat berharga dalam mempersiapkan diri sebagai pemimpin yang tangguh dan berkualitas," pungkasnya. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN



<http://dinkes.kaltimprov.go.id>

Dra. Sri Wahyuni M.P.P.
SEKDA PROV. KALTIM

Dr. Akmal Malik, M.Si
TD GUBERNUR KALTIM

dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



ISTIMEWA

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Dr Jaya Mualimin

Dinkes Kaltim Pertajam Implementasi Pergub Nomor 22

SAMARINDA- Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Jaya Mualimin menyatakan bawah pihaknya tengah mempertajam pengimplementasian Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2023 terkait penyelenggaraan pemerintah di bidang kesehatan.

"Pergub ini telah lama ditunggu dan dirancang terkait pengelolaan pemerintahan di bidang kesehatan. Adanya tata kelola kelembagaan rumah sakit umum daerah (RSUD) di beberapa pasal menjadi lingkup Dinkes," jelas Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin, Jumat (6/10/2023).

Menurut Jaya, Pergub itu bertujuan untuk menyamakan persepsi dan indikator kinerja antara Dinkes dan seluruh rumah sakit yang ada di Kaltim.

Kegiatan yang berhubungan den-

gan layanan harus dilaporkan atau disinkronkan dengan indikator yang sudah dibuat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu merupakan kunci Dinkes harus sama dengan apa yang dilakukan seluruh rumah sakit sehingga tidak ada yang berbeda.

Jaya menyebut Dinkes adalah dinas yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan. Disini ada badan pengawas rumah sakit yang nantinya akan difungsikan apabila banyak keluhan dari masyarakat.

"Masyarakat boleh menyampaikan keluhannya. Kemudian kalau di puskesmas punya keluhan bisa ke dewan pertimbangan klinik. Silakan buat pengaduan semacam meminta menjabatani kalau tidak puas. Jika mau yang lebih besar ada Ombudsman, langsung

ke sini kalau ada laporan," imbuhnya.

Ditambahkan Jaya, di Pasal 17 Pergub Nomor 22 tahun 2023 disebutkan bahwa rumah sakit dipimpin oleh direktur dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

"Hal itu sebetulnya sangat relevan sekarang tren publik harus meningkatkan mutu layanan agar masyarakat luas luas. Karena dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan pengelolaan keuangan itu sangat membantu dalam pengelolaan masyarakat itu sendiri. Semua rumah sakit menggunakan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)," tutup Jaya. **(nta/adv/Dinkes)**

Pewarta : *Ernita*

Editor : *Nicha Ratnasari*



Pentingnya Pengarsipan Arsip Statis dalam Penyelenggaraan Pemerintah

SAMARINDA - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) akan terus mengupayakan terciptanya tertib arsip di lingkungan Pemprov Kaltim, salah satunya adalah menampung arsip statis.

Arsiparis Ahli Muda DPKD Kaltim, Dewi Susanti menjelaskan Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip yakni Organisasi Perangkat Daerah. Karena, masih memiliki nilai guna kesejarahan, walaupun telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan/atau lembaga kearsipan.

Berdasarkan UU RI pasal 18 No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, diamanatkan bahwa setiap unit pencipta arsip memiliki tugas melakukan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan dalam hal ini adalah DPKD Kaltim.

"Penyerahan arsip tersebut merupakan upaya pengamanan dan pelestarian arsip statis yang memiliki nilai guna sejarah, bukti keberadaan (evidential), informasional (informational), dan intrinsik (intrinsic) DPKD Kaltim," ungkap Dewi

Pada umumnya, arsip statis sudah berakhir nilai gunanya sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja bagi unit pencipta arsip namun masih memiliki kegunaan yang lebih luas untuk kepentingan umum sebagai sumber informasi, bahan penelitian dan pembelajaran, atau nilai sejarah.

"Dari arsip kita akan bercerita soal kita dulunya Kaltim dan Kaltara itu satu provinsi, juga sejarah soal otonomi daerah dulu kita belum otonomi sekarang sudah otonomi, atau yang sekarang sejarah soal penetapan IKN, generasi mendatang pasti bertanya catatan sejarah soal penetapan IKN sebagai ibu kota negara Nusantara, yang dulunya ibu kota Indonesia di Jakarta dan sekarang di Kalimantan Timur," jelasnya.

Pentingnya pengarsipan oleh penyelenggaraan pengarsipan adalah untuk merawat dan melestarikan arsip, sebagai alat bukti jika terkendala hukum juga sebagai pacuan tolak ukur pedoman kinerja selanjutnya.

"Misalkan ada yang terkendala hukum maka arsip-arsip ini bisa jadi bukti, terus bisa juga dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah yang inginkan peningkatan target tahun mendatang, otomatis kita melihat kilas kinerja tahun lalu," ujarnya.

Selain itu juga arsip sebagai sumber bahan penelitian, seperti lembaga mahasiswa, pendidikan lembaga sejarah, Sebagai memori kolektif bangsa sumber sejarah baik itu untuk generasi sekarang juga untuk generasi mendatang.

Lembaga - lembaga yang rajin setiap tahunnya menyerahkan arsip kepada DPKD Kaltim adalah BPKAD, Bappeda, Dinas Perkebunan, dan Bagian Umum Pemprov Kaltim yang membawahi sembilan biro. "Jadi ada yang sudah dan ada pula yang masih bertahap mengirim arsip statusnya" katanya.

Dia berharap kepada lembaga perangkat daerah lainnya untuk memanfaatkan tempat arsipnya agar lebih memudahkan pengarsipan.

Bahkan saat ini Pemprov Kaltim sudah mengeluarkan surat tentang penataan arsip Sekretaris Daerah Kaltim no 005/131726/DPK/V/31 Agustus 2023 mengatakan bahwa penataan pengelolaan arsip di semua perangkat daerah Kaltim, pengelolaan arsip dinamis statis pencipta arsip semua pemerintah di Kalimantan timur, arsip statis yang memiliki nilai guna wajib diserahkan, disimpan dan dilestarikan ke lembaga kearsipan Kalimantan Timur. "Kita ingin mewujudkan sadar gerakan arsip di semua unit kerja, kiranya nanti setiap lembaga perangkat daerah Kaltim untuk melakukan koordinasi pengelolaan arsipnya ke DPKD Kaltim, kami tunggu," tutupnya. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Arsiparis Ahli Muda DPKD Kaltim Dewi Susanti MM



YUSVA ALAM

Rapat kerja Komisi II DPRD bersama BPKAD dan Setda Bontang.

Komisi II Konsultasi PP Nomor 53 Tahun 2023 dengan BPKAD dan Setda

BONTANG – Komisi II DPRD Bontang mengadakan konsultasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Bontang dalam rapat kerja terkait Peraturan Presiden (PP) Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, Senin (3/9/2023).

Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam mengatakan, bahwa pihaknya mengadakan konsultasi tersebut lantaran ada beberapa hal yang perlu ditanyakan pada aturan terbaru tersebut. Walaupun PP tersebut baru saja terbit, serta belum ada Permendagri, belum ada peraturan keuangannya, bahkan belum terdapat perwalinya.

"Aturan ini masih lama berlakunya. Masih banyak yang perlu dibahas.

Tapi sejak awal kami sudah tanyakan terlebih dahulu beberapa hal," ujarnya.

Dalam PP tersebut diatur tata cara perjalanan dinas dan pembelanjaan, namun tidak mengatur tata cara belanja perjalanan dinas DPRD.

Dikatakannya, sebelumnya bentuk aturan belanja perjalanan dinas itu adalah headcost, artinya setiap anggota dewan melaksanakan perjalanan dinas, maka semua pengeluaran selama dinas seperti biaya hotel, transport, dan sebagainya harus disetorkan bukti atau kwitansinya.

Namun dengan adanya PP Nomor 53 Tahun 2023 ini terdapat perubahan aturan belanja dinas menjadi sistem lamp sum, yang berarti sudah terdapat limit anggaran belanja dinas yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

"Kalau lumpsum itu misalnya kami

perjalanan dinas ke Jakarta. Terus kami diberikan budget Rp 5 juta, nah apapun yang terjadi ya budgetnya segitu. Kalau ternyata pengeluaran kami lebih dari limit ya resiko ditanggung sendiri, tapi kalau lebih alhamdulillah," bebernya.

Lumpsum ini bukan berarti tidak ada lagi dokumen atau bukti pembayaran. Tetap ada, namun nantinya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak perlu lagi mengecek ke hotel dan lain-lain. Bakal lebih sederhana, cukup mengetahui benar atau tidaknya anggota legislatif ini dinas atau tidak.

"Dengan terbitnya PP ini diharapkan tidak didapati lagi temuan-temuan oleh BPK. Semuanya akan lebih sederhana, karena ada regulasi yang mengatur limit belanja perjalanan dinas tersebut," pungkasnya. (al/adv)



ISTIMEWA

Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam saat diwawancara awak media.

Legislatif Minta Nomenklatur OPD Tak Tepat Dipisahkan

BONTANG – Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam menyatakan ada beberapa OPD yang dirasa tidak tepat nomenklaturannya. Pemkot Bontang harus memisahkan nomenklatur OPD tersebut sesuai bidangnya masing-masing.

Dirinya mencontohkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Bidang kebudayaan tidak tepat bila dipasangkan dengan pendidikan. Karena menurutnya, kebudayaan yang dimaksud tersebut bukan kebudayaan untuk pembelajaran tetapi kebudayaan yang dapat menarik minat orang untuk menonton.

“Contohnya event Bontang City Carnival (BCC) dan Pesta Laut di Bontang Kuala. Saya heran kenapa kok yang garap Disdikbud bukan Dis-

popar. Seharusnya disitu ranahnya wisata karena dapat menarik orang-orang datang menyaksikan,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini pun menyanggah kenapa Disdikbud mengurus pembangunan sekolah. Seharusnya Disdikbud fokus pada pendidikan, seperti bagaimana membuat pengajaran yang baik, meningkatkan akreditasi guru, meningkatkan SDM pengajar, dan lain sebagainya.

“Pembangunan sekolah serahkan saja pada ahlinya Dinas PUPRK, jangan lah Disdik yang mengurus juga. Setelah selesai dibangun baru serahkan ke Disdik untuk mengelolanya. Biarkan masalah infrastruktur diurus oleh OPD yang sesuai,” ungkapnya.

Selain itu ia juga mencontohkan, Dinas Pemuda Olahraga dan Pari-

wisata (Dispopar) seharusnya fokus pada bidang pariwisata saja. Jangan lagi digabung dengan bidang-bidang lainnya.

“Kalau pemkot mau majukan wisata ya biarkan Dispopar fokus pada bidang wisata saja. Jadinya Dinas Pariwisata. Kalaupun mau ditambahkan bidangnya yang harus sesuai, seperti kebudayaan. Jadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,” imbuhnya.

Karenanya ia meminta agar nomenklatur OPD-OPD yang tidak tepat ini dipisahkan. Sehingga OPD dapat fokus pada bidangnya masing-masing. Sehingga hasilnya bisa maksimal dan membantu meningkatkan progres pembangunan oleh Pemkot Bontang. (al/adv)

Ketua Komisi II Minta Semua Aktivitas Pemerintah Berdampak ke UMKM

BONTANG – Pasca pandemi covid-19 semua yang dilakukan Pemkot Bontang harus berdampak kepada UMKM. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPRD, Rustam beberapa waktu lalu. Menurut Rustam, selama pandemi covid-19 perekonomian benar-benar terpuruk. Termasuk para pelaku UMKM yang penjualannya rata-rata merosot tajam. Pasca pandemi para pelaku UMKM pun berjuang untuk kembali memulihkan usahanya. Karenanya Rustam meminta agar pemerintah ikut membantu pemulihan usaha para pelaku UMKM tersebut.

“Memulihkan sebuah usaha yang terpuruk itu berat. Dengan bantuan pemerintah semoga upaya tersebut menjadi ringan dan mudah bagi teman-teman UMKM,” ujarnya saat diwawancara awak media di ruangannya.

Ia memberi contoh, dengan serin-



gnya Pemkot Bontang mengadakan event yang termasuk dalam agenda event 77 wisata. Seharusnya event-event tersebut bisa dimanfaatkan untuk membantu pelaku UMKM.

“OPD yang menyelenggarakan event tersebut bisa memberikan harga sewa murah pada stan-stan yang disediakan. Sehingga para pelaku UMKM yang ingin menyewa merasa dimudahkan dan bisa mendapatkan profit dari berjualan di event itu,” bebernya.

Ditambahkannya, event-event wisata ini juga seharusnya mampu menarik orang-orang dari luar Bontang untuk datang ke Bontang. Jangan sampai event tersebut hanya dinikmati orang Bontang saja.

“Kalau orang-orang luar dari Bontang berdatangan tentu akan memberikan multiplier effect bagi pelaku usaha. Seperti hotel-hotel dan penginapan, toko oleh-oleh, travel, dan lain sebagainya akan mendapatkan dampak positif dengan meningkatkan penjualan,” pungkasnya. (al/adv)



LET'S GO BEYOND



BOOKING THS SAJA

BTS

di Digiroom



Kode Promo
BTSOLI

DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNTETIC SETIAP SERVICE BERKALA*





THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :

Adi S : 0822-5435-0088





Urusan Toyota lebih mudah!



Bontang

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Bigas Kencana No. 116A, Sebelah Kiri, Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

AYO IKUTI!!
LOMBA VIDEO PENDEK

TEMA
PERAN PUPR
MENDUKUNG INFRASTRUKTUR
DESTINASI WISATA

TOTAL HADIAH
33 JUTA RUPIAH

DAFTAR SEGERA

<https://forms.gle/xCaP8bLjtbdAYkhH7>

NARAHUBUNG / CP :
Heny 081254559928
Shinta 082256114744

SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA

1. Peserta lomba terbuka untuk umum dengan usia min 17 tahun (kuota terbatas 40 tim)
2. Peserta lomba berkelompok min 3 orang max 4 orang
3. Video merupakan video pendek berjenis video profil infrastruktur pariwisata Kota Bontang berdurasi max 3 menit dengan resolusi video min 1920x1080px
4. Peserta harus mengisi formulir pendaftaran melalui link : <https://forms.gle/xCaP8bLjtbdAYkhH7>
5. Video pendek bertema sesuai tema yang di tentukan
6. Peserta lomba hanya mengirim satu video pendek
7. Video belum pernah dilombakan dan dipublikasikan melalui media apapun
8. Video merupakan karya baru, original bukan hasil plagiat/mengambil sebagian hak cipta oranglain, apabila dikemudian hari terdapat gugatan hak cipta maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peserta lomba
9. Transportasi menuju 3 spot lokasi yang ditentukan oleh panitia dalam pengambilan video difasilitasi oleh dinas PUPR hanya 1 (Satu) hari
10. Video mencantumkan subtitle berbahasa Inggris
11. Video yang dikirimkan menjadi hak milik Dinas PUPR Kota Bontang
12. Wajib follow Instagram @ppid.dpuprbtg dan @bontang_tourism
13. Peserta tidak dipungut biaya apapun
14. Video tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, kesucilaan, moral, SARA, kekerasan, promosi produk komersial serta tidak mengandung unsur pornografi
15. Materi video dapat diterima panitia paling lambat tanggal 05 oktober 2023 pukul 23.59 wita melalui Email : dpupr25@gmail.com dan ke CP : SHINTA (082256114744)
16. Video yang dikirimkan berhak disiarkan atau ditayangkan oleh panitia untuk keperluan media edukasi dan promosi
17. Keputusan panitia dan dewan juri tidak dapat diganggu gugat
18. Informasi teknis lomba akan disampaikan pada technical meeting
19. Hal-hal yang belum diatur akan diinformasikan berikutnya.

Catat Waktunya :

- 21-27 September 2023 Pendaftaran
- 29 September 2023 (pukul 09.00 wita Seremoni peluncuran lomba video dan pukul 14.00 wita Technical Meeting)
- 30 September 2023 (pukul 06.00 wita Spot Hunting di 3 lokasi
 - Karang Pasilan (Snorkling)
 - Kampung Malahing
 - Pulau Beras Basah
 - + additional : Pulau Segajah
- 12 Oktober 2023 (pukul 20.00 wita pengumuman pemenang secara "live" di acara Gala Dinner HUT Kota Bontang Ke-24 di Pendopo Rujab Walikota)



Buaya Riska yang saat ini berada di kandang karantina di penangkaran buaya Tritip Balikpapan.

Buaya Riska Masuk Kandang Karantina di Penangkaran Buaya Tritip Balikpapan

BALIKPAPAN - Penangkaran buaya Tritip telah menerima buaya fenomenal "Riska" pada Rabu (4/10/2023) dini hari sekitar pukul 04.00 Wita. Kedatangan buaya Riska ini berdasarkan permintaan BKSDA Kaltim yang menerima sejumlah keluhan masyarakat Kawasan Guntung, Bontang perihal adanya buaya yang memangsa manusia.

Pengelola penangkaran buaya Tritip Balikpapan, Arif Anggoro mengatakan, pihaknya hanya menerima seekor buaya dari Kota Bontang. Namun, kepastian apakah itu buaya Riska atau bukan pihaknya tidak bisa memastikan.

"Tapi kemarin Pak Ambo itu datang ke sini dan menemui buaya tersebut. Sehingga kemungkinan memang benar itu Riska," ujarnya, Jumat

(6/10/2023).

Lebih lanjut Arif menjelaskan, buaya yang diterimanya tersebut memiliki panjang 4,42 meter dengan jenis kelamin jantan. Dan saat ini buaya tersebut sedang mengalami karantina di kandang terpisah.

"Kami karantinakan di salah satu kandang, kami sebut itu kandang pembesaran nomor 5. Dalam kolam itu ukuran 6x12 meter, dia sendirian," jelasnya.

Dikatakan Arif jika di penangkaran buaya Tritip Balikpapan menerima titipan buaya dari manapun, termasuk dari lembaga konservasi. "Harus dikarantina selama 3-7 hari. Jadi dimohon tidak melakukan aktivitas berlebihan di sekitar kolam tersebut selama Karantina," tambahnya.

Saat ini kondisi buaya Riska dalam

keadaan baik-baik saja dan masih dalam masa kelelahan usai perjalanan cukup jauh.

"Buaya Riska dalam keadaan baik-baik saja. Namun selama berinteraksi, belum mau makan. Karena Pak Ambo datang itu baru hari kedua, mungkin masih jetlag ya kalau manusia," ujar Arif lagi.

Buaya Riska terus mendapat pemantauan dari pihak BKSDA Kaltim selama berada di penangkaran buaya Tritip Balikpapan ini. Nanti setelah selesai karantina, jika kondisinya masih normal akan dipindahkan ke kandang yang lebih besar lagi.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Ketua KPU Kabupaten Paser, Abdul Qayyim Rasyid

Ada 1.226 Pemilih Disabilitas di Paser, KPU Maksimalkan Layanan saat Pemungutan Suara

PASER - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser memastikan, sebanyak 1.226 orang penyandang disabilitas sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Lebih rinci, Ketua KPU Kabupaten Paser, Abdul Qayyim Rasyid menjelaskan, pemilih penyandang disabilitas yang tersebar di 10 Kecamatan ini, terbagi menjadi 4 kategori. Dari kategori itu, disabilitas fisik jadi yang terbanyak.

"Disabilitas fisik di Kabupaten Paser sebanyak 633 pemilih, lalu disabilitas sensorik sebanyak 290 pemilih, disabilitas mental sebanyak 229 pemilih dan disabilitas intelektual sebanyak 74 pemilih," kata Qayyim saat ditemui, Jumat (6/10/2023).

Dari jumlah itu, diuraikan Qayyim, disabilitas sensorik dibagi menjadi 3 kategori, yakni disabilitas sen-

sorik wicara sebanyak 131 pemilih, disabilitas sensorik netra sebanyak 99 pemilih dan disabilitas sensorik rungu sebanyak 60 pemilih.

"Jadi jumlah penyandang disabilitas yang tercatat dalam DPT, mencapai 0,58 persen dari total DPT," ucapnya.

Qayyim menyebut, dalam memberikan layanan maksimal kepada pemilih disabilitas saat pemungutan suara nanti, pihaknya akan memberikan fasilitas yang memudahkan pemilih berkebutuhan khusus ini, agar memiliki hak yang sama dengan pemilih lainnya.

Untuk memberikan kenyamanan pada pemilih penyandang disabilitas, KPU akan menyiapkan sejumlah fasilitas seperti akses khusus disabilitas di TPS, antrian ramah disabilitas, hingga desain surat suara yang memudahkan pemilih disabilitas.

"Itu nanti kami siapkan di setiap TPS yang ada pemilih berkebutuhan khusus. Jadi, aksesibilitas bagi pemilih, itu yang juga masuk dalam layanan maksimal kami," ujarnya.

Misalnya untuk pemilih disabilitas sensorik netra, diperbolehkan untuk menentukan sendiri siapa pendampingnya, dan pendamping tersebut wajib merahasiakan pilihan pemilih di bilik suara. Hal ini ditujukan, guna memperlancar proses pemungutan suara.

Sementara itu, KPU Kabupaten Paser telah menetapkan ada 211.377 pemilih dalam DPT Pemilu 2024. Jika dibandingkan DPT Pemilu 2019, jumlah pemilih ini bertambah. Penambahan itu mencapai 25.690 DPT, sesuai jumlah DPT di Pemilu 2019 sebanyak 175.687 DPT.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun saat pelepasan dan penyerahan bantuan ke KPM, Jumat (6/10/2023).

Ribuan Warga PPU Terima Bantuan Cadangan Pangan, Penyaluran Ditarget Rampung Bulan Ini

PPU - Sebanyak 9.899 keluarga penerima manfaat (KPM) di Penajam Paser Utara (PPU) menerima bantuan beras. Pj Bupati PPU Makmur Marbun menargetkan pendistribusian rampung Oktober 2023 ini.

Secara simbolis penyerahan dilakukan langsung oleh Makmur Jumat (6/10/2023). Ia juga sekaligus melaunching pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) pusat.

Pada periode Oktober ini untuk didistribusikan di 3 kecamatan lainnya di PPU masing-masing kecamatan Waru, Babulu dan Sepaku. Makmur meminta untuk percepatan pendistribusian cadangan pangan yang bersumber dari pemerintah pusat khususnya pada bulan Oktober ini.

"Saya minta untuk bantuan pangan ini agar dapat segera didistribusikan kepada para keluarga penerima man-

faat yang ada di PPU. Tolong dinas terkait bantuan ini agar betul-betul tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya," ungkapnya.

Ada beberapa alasan pemerintah pusat melakukan pendistribusian cadangan pangan ini. Salah satu tujuannya yaitu untuk mengatasi krisis pangan dan mencoba mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan.

Pemberian bantuan pangan tersebut tidak bisa dilakukan secara terus menerus. Yang terpenting justru ke depan bagaimana masyarakat dapat semakin diberdayakan.

"Seluruh perangkat daerah yang bertugas, yang bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan ini harus bersinergi dengan stakeholders

terkait. Harus biasa berkolaborasi "ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) PPU, Mulyono mengatakan bahwa rentang September hingga November 2023 ini ada sebanyak 9.899 KPM. Jumlah itu dari empat kecamatan yang tersebar di 54 desa dan kelurahan di PPU.

Adapun bantuan pangan yang diberikan berupa beras sebesar 10 kilogram setiap bulan kepada masing-masing keluarga.

"Diharapkan dengan pendistribusian CPP di kabupaten PPU tersebut bisa membantu masyarakat yang membutuhkan termasuk dapat meringankan dampak adanya El Nino saat ini," tutupnya.

Pewarta : Nur Robbi
Editor : Nicha Ratnasari



MEDIA KALTIM

Konferensi pers H-1 Rossa Another Journey The Beginning

Konser Rossa Another Journey The Beginning, IDN Pilih Samarinda Jadi Kota Pertama di Kalimantan

SAMARINDA-KarnavALLMusikKalimantan yang dipersembahkan oleh Accor Live Limitless akan berkolaborasi dengan IDN untuk menggelar konser Rossa Another Journey The Beginning pada Sabtu (7/10/2023) di Convention Hall Sempaja Samarinda. Kota Samarinda menjadi kota pertama yang terpilih mewakili Kalimantan untuk event tersebut.

Direktur Operasional Accor Indonesia, Endrian Hananto mengatakan, konser yang bertema Another Journey The Beginning ini adalah lebih menasar ke anak muda. Dan Rossa akan membawakan album terbaru

yang bergaya anak muda.

"Samarinda ini kan banyak sekali anak muda, lebih ke kota pelajar gitu. Saya rasa konser Rossa ini cocok digelar di Samarinda," ungkap Endrian, Jumat (6/10/2023) di Hotel Mercure Samarinda.

IDN sendiri belum pernah menyentuh daerah Kalimantan. Dan Samarinda menjadi salah satu untuk mewakili Kalimantan.

Di sisi lain, Direktur Utama Inspire IDN, P. Intan S menyatakan, tiket konser Rossa Another Journey The Beginning nyaris 100 persen terjual. "Tiket yang berjumlah 3.000 itu su-

dah nyaris habis. Sudah mencapai 97 persen," katanya.

Hingga saat ini tiket masih bisa dibeli melalui aplikasi ALL. Dan khusus untuk member Accor akan mendapatkan diskon 15 persen. "Bagi yang ingin bergabung ke dalam Accor itu free alias gratis. Sehingga untuk pembelian tiket bisa mendapatkan diskon sebesar 15 persen," pungkasan Intan.

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



LOWONGAN JURNALIS

Media online **MEDIA KALTIM GROUP** membutuhkan beberapa tenaga profesional untuk bergabung di tim redaksi **SAMARINDA & PENAJAM PASER UTARA (PPU)** :

JURNALIS

SYARAT:

Maksimal usia 25 tahun, berjiwa tim, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kreatif, dan menyukai tantangan. Fresh graduate boleh melamar, diutamakan kandidat berpengalaman bidang jurnalisme atau media

Deadline Pengirim CV & Lamaran 30 September 2023.

Pastikan mencantumkan posisi yang dilamar pada subjek email atau pesan WA.

Kirimkan ke **redaksi@mediakaltim.com**

atau WA ke **0853-4894-3982 (SAMARINDA)**
0815-4910-5488 (PPU)

radar.
MEDIA

MEDIA KALTIM GROUP



MEDIA KALTIMTARA

SABTU,
7 OKTOBER
2023

.COM

PASANG IKLAN
HUBUNGI:
0853 8684 3137

TERDEPAN DALAM BERITA



TERTIBKAN APS PARPOL DIDEDLINE TIGA HARI

BACA HALAMAN 2-3



BUSTAN MINTA MEDIA
SAJIKAN INFORMASI
AKURAT DAN OBJEKTIF

BACA HALAMAN 14



Bawaslu Bulungan keluarkan edaran terbaru usai rapat pleno tingkat pimpinan.

Bawaslu Bulungan, Deadline Parpol Tiga Hari

Untuk Tertibkan Alat Peraga Sosialisasi Secara Mandiri

TANJUNG SELOR - Bawaslu Bulungan kembali menerbitkan surat imbauan, mengenai penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS), di seluruh Kecamatan yang ada di Bulungan.

Surat imbauan tersebut dikeluarkan pada Kamis (5/10/2023). Adapun, dasar hukum dikeluarkan imbauan

itu diantaranya, UU 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan UU 7 tahun 2023, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi UU.

Kemudian, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) nomor 28 tahun 2018, tentang pengawasan kampanye pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan Perbawaslu nomor 28 tahun 2018 tentang penga-

wasan kampanye pemilu.

Selanjutnya, ada Perbawasslu nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu. Perbawasslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Perbawasslu nomor 8 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelanggaran administrasi pemilu.

Disamping itu, juga ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum, PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Aturan lainnya, berupa PKPU 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Ketua Bawaslu Bulungan, Dwi Suprpto menyampaikan,

berdasarkan hasil pleno tingkat pimpinan, pada Kamis 4 Oktober 2023, mengenai APS yang melanggar PKPU 15 tahun 2023, tentang kampanye pemilihan umum bakal ditindak.

"Kita sudah melakukan beberapa cara untuk mengingatkan partai politik, supaya menurunkan secara mandiri, terhadap APS yang telah dipasang. Hal itu berdasarkan pada imbauan yang dikeluarkan pada 1 Agustus 2023 lalu," ujar Dwi Suprpto.

Dia katakan, selain imbauan Bawaslu telah adakan rapat koordinasi dengan gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pada 15 September 2023 lalu. Imbauan kedua, dari hasil rapat koordinasi itu, dikeluarkan pada 19 September 2023.

"Tapi, hasil penelusuran Bawaslu Bulungan dan jajaran masih ditemu-

kan sejumlah APS yang masih terpampang, pada 10 Kecamatan di Bulungan," jelasnya.

Bawaslu masih memberikan kelonggaran, terhadap parpol untuk melakukan penertiban APS tersebut secara mandiri. Sebelum dilakukan penindakan dengan melibatkan OPD terkait. Pihaknya, memberikan tenggat waktu kepada parpol untuk menertibkan APS tersebut, hingga Minggu 8 Oktober 2023.

"Jika pada timeline yang kita tentukan, masih terdapat APS yang bertebaran di wilayah Bulungan, maka Bawaslu dengan OPD terkait akan melakukan penindakan pada 9 Oktober 2023," tandasnya. **(tin/and)**

Editor: Andhika

KALTARA
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

bangga melayani bangsa
BerAKHLAK
BerAKHLAK: Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

78
TNI PATRIOT NKRI
PENGAWAL DEMOKRASI UNTUK INDONESIA MAJU

DIRGAHAYU TNI
5 OKTOBER 1945 - 5 OKTOBER 2023
TNI PATRIOT NKRI
PENGAWAL DEMOKRASI UNTUK INDONESIA MAJU

Drs. H Zainal A Paliwang SH, M.Hum
Gubernur Kalimantan Utara

Dr. Yansen TP, M.Si
Wakil Gubernur Kalimantan Utara

DKISP Kaltara | diskominfo.kaltaraprov.go.id | [f](#) [t](#) [i](#) [s](#) | [DKISP Kaltara](#) | [@diskominfokaltara](#)



Anggota Komisi I DPRD Berau, Faletinus Keo Meo.

Angkat Bicara Soal Kasus Pencabulan Oknum ASN Terhadap PTT, Faletinus: Pecat Pelaku!

TANJUNG REDEB - Adanya kasus pencabulan yang dilakukan oknum ASN terhadap salah seorang PTT mendapat sorotan Anggota Komisi I DPRD Berau, Faletinus Keo Meo. Dirinya menegaskan bahwa oknum ASN tersebut harus dipecat. Pasalnya hal tersebut mencoreng wajah seluruh ASN di Bumi Batiwakkal.

Menurutnya, sebagai seorang ASN yang senior, wajib memberikan contoh yang baik. Bukan malah membuat citra buruk. "Seorang ASN, tentu harus bisa menjadi contoh bagi para PTT. Bukan malah berbuat hal tidak senonoh," katanya.

Dirinya memaparkan, sesuai dengan ayat (1) Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

tentang disiplin PNS, menyatakan bahwa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

"Jika terbukti, berikan sanksi tegas. Berhentikan, kasihan korban, datang ke tempat yang sama setiap hari. Dan merasakan trauma lagi," tegasnya.

Dia melanjutkan, jika dibiarkan oknum ASN tersebut tentu akan kembali melakukan aksinya. Menurutnya, ini sudah seperti penyakit kronis, dalam suatu instansi. Fale mewanti-wanti kepala dinas tempat ASN tersebut bertugas agar berani bertindak. Jika memang bersalah, segera lakukan penindakan. "Kepala dinas jangan takut. Jangan bersembunyi di balik

ASN. Harus tegas," imbuhnya.

Politikus Demokrat ini siap berikan pendampingan kepada korban. "Tetapi harus berani bersuara. Jangan sampai, ada timbul korban lainnya jika dibiarkan," ungkapnya.

"Saya paling tidak suka pencabulan. Jika perlu, dihukum seberat-beratnya," tambahnya.

Kendati demikian, Faletinus mendorong pihak instansi tersebut untuk segera menindak kasus ini agar pelaku jera dan tidak melakukan aksinya lagi. "Saya juga kaget ada kasus seperti ini. Itu manusia rendah, tidak bisa melawan hawa nafsu. Lebih baik diberhentikan," tandasnya. (adv/and)

Pemenang Lomba Branding dan Tagline Pariwisata Berau dari Luar Daerah, Madri Sebut Tetap Apresiasi

TANJUNGREDEB - Lomba Branding dan Tagline Pariwisata Kabupaten Berau yang digelar beberapa waktu lalu dimenangkan peserta dari Situbondo, Jawa Timur.

Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengaku sangat berharap yang menjadi pemenang lomba saat itu berasal dari Bumi Batiwakkal. Sehingga keputusan dewan juri yang memenangkan peserta luar daerah sangat disayangkannya. "Mereka kan juga belum pernah tau tentang seluk beluk kearifan lokal wisata kita, tetapi mereka sudah bisa juara," ungkapnya.

Dia menyebut, apapun yang telah diupayakan oleh pemerintah daerah, pihaknya selalu mengapresiasi. "Kalau memang itu bagus dan ada kekurangan ya kita akan beri masukan," katanya.

Politikus NasDem itu mengungkapkan, meski lomba branding dan tagline dimenangkan orang luar daerah, tetapi diharapkannya logo tersebut bisa membawa dampak baik kepada promosi wisata kabupaten paling utara Kaltim ini.

"Semoga saja apa yang diharapkan dengan adanya logo itu bisa membawa keberkahan kepada pariwisata kita," tandasnya. (adv/and)



Ketua DPRD Berau, Madri Pani

Ratna Dorong Pelayanan di RSUD Abdul Rivai Lebih Ditingkatkan



Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Ratna

TANJUNG REDEB - Pelayanan antrean nomor urut di RSUD dr Abdul Rivai disorot Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Ratna. Pasalnya hal itu dikeluhkan masyarakat.

Ia membeberkan, masyarakat rela datang pagi hari untuk mendapatkan nomor antrean terdepan, namun mereka menerima kekecewaan, karena rata-rata nomor antrean sudah di atas 50. "Masyarakat kecewa dan harus datang jam berapa agar bisa mendapatkan antrean yang cepat," ungkapnya.

Dirinya mengaku, pihaknya sudah pernah membahas hal ini dengan manajemen rumah sakit, namun alasan mereka, bahwa pelayanan antrean sudah menggunakan sistem online dan offline.

Namun, Ratna menilai alasan itu kurang tepat. Karena tidak semua masyarakat memahami penggunaan gadget. Ditambah masyarakat mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait tiket online tersebut.

"Jangan samakan kalau masyarakat bisa menggunakan smartphone. Tidak semua mengerti, ini yang harus diperbaiki," tegasnya.

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, masalah antrean ini harus dibenahi, jangan sampai masalah ini terus berlarut-larut, hingga menyebabkan masyarakat enggan untuk berobat ke rumah sakit.

"Mungkin ini program ketika masa pandemi kemarin. Jadi kembalikan saja sistem offline dan jelaskan jam buka dan tutup loketnya agar memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang lebih akurat," bebernya.

Ratna berharap, agar ada perubahan dari rumah sakit untuk bisa menjamin nomor antrean tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Juga agar pelayanan kesehatan bisa berjalan maksimal. "Kasihannya masyarakat yang jauh. Tolong ini menjadi perhatian," pungkasnya. (adv/and)

Jangan Hanya Drainase, Suriansyah Juga Dorong Peningkatan Jalan

TANJUNG REDEB - Peningkatan drainase di wilayah perkotaan Tanjung Redeb yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau diapresiasi Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriansyah.

Dia menilai, langkah yang dilakukan Pemkab Berau sudah tepat. Pasalnya, peningkatan drainase bisa meminimalisir terjadinya genangan ketika curah hujan sedang tinggi.

"Hujan deras sedikit air mudah menggenang, bahkan di beberapa titik rumah warga bisa sampai terendam oleh banjir," ungkapnya.

Dirinya menuturkan, sebaiknya peningkatan drainase diprioritaskan untuk wilayah dataran rendah. Sebab, kata Suriansyah, kawasan tersebut mudah tergenang.

"Tetapi lebih bagus lagi jika pembangunan drainase merata di seluruh kawasan kota," tuturnya.

Politikus Hanura ini berharap, kedepannya juga ada program peningkatan jalan kecil dan gang, sebagai upaya mengurangi dampak dari hujan deras di kawasan perkotaan Kabupaten Berau.

"Kami di DPRD pasti mendukung program yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Koordinasi dengan DPUPR Berau juga terus kami lakukan untuk setiap program tersebut," tandasnya. (adv/and)



Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriansyah

Pariwisata Berau Sudah Dikenal Hingga Mancanegara, Syarifatul: Tinggal Maksimalkan Fasilitas Pendukung



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah

TANJUNG REDEB - Fasilitas pendukung objek wisata diminta Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah untuk dimaksimalkan. Terlebih sektor pariwisata Bumi Batiwakkal sudah terkenal hingga mancanegara.

Ia menerangkan, untuk menentukan fasilitas yang perlu dibenahi, harus melakukan inventarisasi terlebih dahulu. "Pariwisata Berau harus betul-betul dipersiapkan," tuturnya.

Menurutnya, objek wisata bukan hanya soal pemandangan dan bangunan yang unik. Namun bagaimana suatu tempat wisata bisa memiliki potensi unggulan yang berbeda. "Kita harus punya terobosan baru. Dan saya harap OPD terkait bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki," katanya.

Dengan begitu, dirinya optimistis akan berdampak kepada meningkatnya kunjungan wisatawan ke kabupaten paling utara Kaltim ini. "Yang terpenting bisa meningkatkan PAD kita dari pariwisata dan wisatawan yang datang merasa nyaman," imbuhnya.

Politikus Golkar ini berharap, kedepannya bisa banyak aktivitas ekonomi yang bisa dilakukan di sekitar objek wisata. Tentunya akan membawa dampak baik kepada masyarakat sekitar. "Seperti UMKM yang menjual oleh-oleh asli daerah, penginapan dan rumah makan, tentu akan merasakan dampak meningkatnya jumlah kunjungan," tandasnya. (adv/and)



Pustakawan Ahli Muda DPKD Kaltim Winda Fitri Yantie SE MM

DPKD Kaltim Ajak Masyarakat Untuk Memanfaatkan website Pustaka Borneo, Untuk Mengenalkan Budaya

SAMARINDA – Terpilih sebagai Center of Excellence Borneo sejak 2010 lalu oleh pemerintah pusat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dipercaya mengelola website Pustaka Borneo. Hal ini dikatakan oleh Pustakawan Ahli Muda DPKD Kaltim Winda Fitri Yantie SE MM

“www.pustakaborneo.org adalah situs rumah belajar, jadi ini program pemerintah pusat sebenarnya sejak ditunjuk sebagai Center of Excellence Borneo, Kaltim diamanahi sebagai pengelola pusat situs ini, nah karena namanya Borneo jadi ini website untuk seluruh Kalimantan, jadi jika ada dari Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltara ingin mengajukan pengembangan situs Pustaka Borneo mesti melewati pengelola di Kaltim,” ungkapnya.

Manfaat dari situs ini adalah sebagai sarana memperkenalkan budaya khas Kalimantan, konservasi alam, kesehatan, pengembangan

pertanian organik, tanaman obat dan lain-lain kepada lingkungan sekolah, masyarakat setempat dan masyarakat umum.

Oleh sebab itu Yantie berharap kepada masyarakat diseluruh Kalimantan, khususnya Kaltim untuk bisa memanfaatkan situs Website Pustaka Borneo, agar budaya dan sejarah yang ada di Kalimantan bisa dikenal seluruh Indonesia.

“Kita pun koordinasikan seluruh perpustakaan yang ada di Kaltim untuk memanfaatkan Situs ini untuk meng-upload mengenai sekolah atau Desa/Kelurahan yang berkaitan tentang budaya disekitar mereka, agar kebudayaan yang ada bisa dikenalkan,” katanya.

Situs ini, selain banyak memuat tentang konten kebudayaan literasi, didalamnya juga mengenalkan sejarah Kesultanan yang ada di wilayah Kalimantan, tapi untuk naskah kuno berkaitan sejarah Kesultanan, yang dimuat hanya sebagian draf secara

umum, untuk lebih jelas dan lengkap pembaca diarahkan untuk mendatangi perpustakaan yang menyimpan naskah kuno tersebut.

“Misalkan ada yang ingin mengetahui sejarah kesultanan Kutai di situs ini, cuma informasinya tidak lengkap karena berupa draf saja, jika ingin mengetahui lebih agar bisa mendatangi perpustakaan Kaltim, karena berkas sejarah itu gak bisa sembarangan di muat atau di minta, begitu pula tentang kesultanan lainnya di seluruh Kalimantan, Contohnya kesultanan Banjar artinya menatengin ke Perpustakaan Kalsel untuk lebih jelasnya,” paparnya.

Dia berharap dengan adanya situs Pustaka Borneo ini masyarakat Kaltim akan lebih mengenal budaya-budaya yang ada di Kalimantan dan mampu mencerdaskan masyarakat.

“Semoga mampu menambah wawasan, meningkatkan minat baca serta mengembangkan budaya literasi,” tutupnya. (adv/and)



Pustakawan Ahli Muda Patimah Irni SPd MSi

Keliling Kalimantan, DPKD Kaltim Siap Kerja Sama Kembangkan Budaya dan Pelestarian Naskah Kuno

SAMARINDA – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPK) Provinsi Kalimantan Timur akan berkeliling pulau Kalimantan untuk meningkatkan kerja sama. Hal ini merupakan hasil kesepakatan dari Rapat Koordinasi Pengembangan Center of Excellent Budaya Kalimantan dan Sosialisasi Pelestarian Naskah Kuno, yang sebelumnya telah dilaksanakan di Taman Pintar Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Juli 2023 lalu.

Keliling Kalimantan ini dalam rangka mengunjungi DPKD yang belum menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan DPKD Kaltim. Sejauh ini yang telah bertanda tangan baru DPKD Kaltara, sisanya adalah Kalsel, Kalteng dan Kalbar.

“Waktu kita rakor, semua perwakilan dari 5 provinsi di Kalimantan itu setuju adanya kerja sama kebudayaan. Tapi waktu itu cuma dihadiri oleh kabit-kabitnya saja. Oleh sebab itu kami yang akan berkunjung ke dinas perpustakaan yang ada di Kalsel, Kalteng dan Kalbar,” ungkap Pustakawan Ahli Muda, Patimah Irni saat ditemui di ruang kerjanya.

Pihak DPKD Kaltim sudah melaku-

kan rapat internal untuk penentuan kapan akan berangkat keliling ke tiga provinsi tersebut. “Kita target sih bulan Oktober ini jadwal sudah siap, tapi paling tidak November sudah selesai semua PKS ini” tegasnya.

Dengan ditanda tangannya PKS tersebut nantinya, kerja sama antar provinsi se-Kalimantan untuk melestarikan Budaya dan naskah kuno bisa dijalankan.

Kerjasama ini penting karena mengacu pada Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 78a tahun 2011 hanya ada enam Badan Perpustakaan Provinsi yang ditetapkan menjadi Center of Excellent, dan Kaltim salah satunya.

Penunjukkan Kaltim sebagai Center of Excellent sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Namun, hingga sekarang belum ada perkembangan kegiatan atas program yang harus dijalankan.

Daerah yang ditunjuk sebagai Center of Excellent sendiri memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan pemustaka terhadap informasi tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya budaya dan etnis di Kalimantan.

Selain itu, Irni mengatakan DPKD Kaltim telah mengembangkan website Pustaka Borneo yang akan digunakan sebagai wadah untuk mengenalkan semua kultur budaya yang ada di Kalimantan.

“Jadi kita juga sudah sosialisasi Web Pustaka Borneo, semua konten budaya yang ada di Kalimantan bisa kita muat disana, nanti semua konten budaya yang diajukan dari seluruh Kalimantan, sebelum di upload pastinya akan berkoordinasi dengan kami di sini terlebih dahulu sebagai pengelola website Pustaka Borneo,” ujarnya.

Karena pentingnya sejarah, budaya dan kultur Kalimantan untuk dikembangkan, maka DPKD Kaltim berharap hal ini didukung oleh semua elemen pemerintahan dan masyarakat agar kebudayaan Kalimantan bisa terjaga.

“Tentunya kami juga membutuhkan dukungan oleh semua elemen masyarakat dan pemerintahan, terutama kalo bisa Anggota DPRD Kaltim pun harus mendukung, agar lebih mudahnya dalam pengembangan kebudayaan, sejarah dan pelestarian naskah-naskah kuno ini,” tutupnya. (adv/and)



Suasana pemusnahan arsip menggunakan mesin pencacah arsip.

BPKAD dan DPKD Kaltim Musnahkan Arsip Berusia Lebih dari 10 Tahun

SAMARINDA – Arsip yang telah melampaui batas usia ideal yakni 10 tahun harus dimusnahkan. Hal ini berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemusnahan Arsip.

Atas dasar tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kaltim melakukan pemusnahan Arsip Ex Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim kurun waktu Tahun 2007 sekaligus penyerahan arsip statis kepada DPKD Kaltim, yang dilaksanakan pada Selasa (3/10/2023) bertempat di Aula Kantor BPKAD Jalan Kusuma Bangsa Samarinda Kota.

Pemusnahan arsip tersebut, dihadiri langsung oleh Arsiparis Alih Media Ketua Tim Akuisisi Kementerian Lembaga Perpindahan Ibukota Negara, Drs. Tato Purjianto, Asisten Gubernur Bidang Administrasi Umum, Ir. Riza Indra Riadi, M.Si., Plh DPKD Kaltim Taufick S.Sos, M.Si Dan Kepala BPKAD Kaltim, Fahmi Prima Laksana, S.E, MM

Kepala BPKAD Kaltim, Fahmi Prima Laksana, S.E, MM dalam sambutannya sekaligus membuka acara

menyebutkan bahwa di lembaganya terdapat 9.425 berkas arsip statis, 85 berkas arsip akan diserahkan dan disimpan DPKD Kaltim, dan data lainnya 2.236 arsip disimpan BPKAD berstatus inaktif dan 6.707 arsip disetujui untuk dimusnahkan.

“6.707 arsip telah disetujui dimusnahkan, saya sangat apresiasi pejuang arsip BPKAD. Sejak 2015, BPKAD sudah melakukan pemusnahan arsip sebanyak 5 kali. Semoga semangat menjaga dan merawat arsip ini dapat menjadi inspirasi bagi SKPD lainnya dalam upaya tertib pengelolaan arsip,” papar Fahmi.

Fahmi melanjutkan, BPKAD menjadi SKPD yang dinilai baik dalam pengelolaan arsip setelah Universitas Indonesia. Namun, bukan hanya dari segi prestasi yang harus ditiru akan tetapi komitmen dalam menjaga arsip terkelola secara berkelanjutan yang menjadi harapan Fahmi kepada seluruh OPD di Kaltim.

“Bukan hanya prestasi, Yang paling penting adalah komitmen dalam menjaga arsip terkelola secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Sementara itu, Plh Kepala DPK Kaltim, Taufik, S.Sos, M.Si, memberikan apresiasi kepada DPKAD atas dedikasinya dalam menjaga penge-

lolaan arsip dengan tertib.

Taupik menyebutkan saat ini baru terisi 25 persen penyimpanan arsip OPD di Depo Arsip DPK Kaltim. Ia berharap 75 persen dari ruang penyimpanan Depo Arsip turut dapat diisi oleh berkas OPD lainnya.

“DPKD Kaltim menjadi pilot project untuk OPD lain dalam menerapkan sistem penataan arsip. Mohon partisipasinya secara professional kepada masing-masing OPD. Arsip yang dikelola dengan baik akan mempunyai nilai yang sangat vital dan penting,” jelas Taufik kepada para audiens yang hadir.

Usai sambutan agenda kemudian dilanjutkan dengan proses pemusnahan arsip melalui mesin pencacah arsip oleh Plh Kepala DPK Kaltim, Kepala BPKAD Kaltim, dan perwakilan ANRI. Ditutup dengan penyerahan arsip statis secara simbolis oleh BPKAD kepada DPK Kaltim.

Diketahui, Pemusnahan arsip merupakan salah satu cara penyusutan arsip sehingga penyelenggaraan kearsipan menjadi lebih efektif dan efisien. Pemusnahan arsip juga bertujuan untuk mengamankan informasi arsip dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (adv/and)



Pustakawan Ahli Muda Winda Fitri Yantie

DPKD Hadirkan iKaltim, Perpustakaan Digital yang Lebih Memudahkan Masyarakat

SAMARINDA – Siapa yang sudah tahu? Ternyata Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPK) Kalimantan Timur saat ini memiliki perpustakaan digital namanya iKaltim, sebagai sarana untuk mencari buku dalam bentuk digital atau ebook bagi yang tidak sempat ke Perpustakaan Kaltim.

Pustakawan Ahli Muda DPKD Kaltim Winda Fitri Yantie mengatakan, aplikasi iKaltim merupakan aplikasi perpustakaan digital yang bisa didownload di Playstore. Di dalam aplikasi tersebut tersedia ribuan ebook yang bisa dibaca di dalamnya.

“Jadi kalau nggak sempat ke Perpustakaan, bisa mencari buku bacaan atau referensi di iKaltim. Syaratnya mudah, kita untuk masuk cukup mendaftar secara online menggunakan email dan FB,” kata yang sering disapa Yantie ini.

Setiap ebook yang tersedia di iKaltim tidak bisa di download, han-

ya bisa dibaca dan berjangka waktu. Ini untuk menjaga hak cipta pemilik buku, agar tidak sembarangan orang bisa mengambil bukunya.

“Kita menjaga hak cipta, jadi nggak bisa sembarangan di download, dan jangka waktunya juga sekitar 1 minggu sudah hilang, Jadi perlu membuka dari awal kembali jika ingin meneruskan membaca” ungkapnya.

Dia menyebutkan banyak yang merasa terbantu dengan hadirnya iKaltim ini, karena sangat memberikan kemudahan para pembaca jika ingin mencari sebuah referensi.

“Bahkan ada dosen berkata dengan saya, dengan adanya iKaltim ini sangat membantu sekali mencari buku bacaan dan nggak harus beli karena bisa dibaca secara gratis. Kurikulum Merdeka itu kan para pengajar diminta mencari referensi sendiri, nah dari iKaltim mereka merasa terbantu nggak harus ke sana ke mari cari referensi,” ujarnya.

Yantie pun berharap semua lapisan masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah secara gratis ini. Dengan harapan agar bisa menambah wawasan dan inspirasi baru dari ebook yang ada di iKaltim.

“Jadi kita setiap tahun terus mensosialisasikan ikaltim, agar bisa dimanfaatkan, Karena nggak perlu datang, walaupun kita berada jauh bisa membaca dari perpustakaan digital ini, karena ribuan Ebook ini banyak berkaitan dengan pertanian, perkebunan, ekonomi, biologi, politik dan buku-buku referensi lainnya,” tutupnya.

Diketahui, aplikasi iKaltim atau perpustakaan digital ini telah dicanangkan oleh Gubernur Kaltim sejak 2016 silam. iKaltim diciptakan sebagai sarana online bagi masyarakat yang membutuhkan buku bacaan jika tidak sempat untuk berkunjung ke Perpustakaan. (adv/and)

Kajian Risiko Bencana, Dipandang Penting Sebagai Bentuk Mitigasi Awal

TANJUNG SELOR - Titik spot Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Bulungan, bisa dibilang berkurang sepanjang tahun 2023.

Meskipun begitu, bencana alam jenis lainnya seperti banjir, kebakaran rumah hunian, bahkan sampai kasus orang tengelam. Menanggapi soal aktifnya bencana alam yang terjadi, Bupati Bulungan, Syarwani meminta masyarakat untuk tetap waspada.

Hal itu disampaikan bupati, disela sosialisasi dan interanlisasi penyusunan kajian resiko bencana (KRB) dan sistem informasi bencana berbasis web, baru-baru ini.

Syarwani mengatakan, secara geografis Sungai Kayan yang melintasi Kabupaten Bulungan di hulunya, terhubung langsung dengan Sungai Wahau. Sehingga, ketika terjadi banjir di sungai tersebut menyebabkan ketinggian air di Sungai Kayan, Bulungan ikut naik. "Sehingga kajian resiko bencana berbasis web ini, saya pikir penting untuk kita laksanakan," ujar Syarwani.

Dia mengungkapkan, KRB menjadi pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul, akibat potensi bencana. Seperti, jika terjadi dapat terdeteksi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, hingga kerusakan lingkungan serta hubungannya dengan elemen resiko berupa bahaya, kerentanan dan kapasitas.

KRB, lanjutnya merupakan dokumen wajib daerah yang dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Bulungan.

KRB disusun, dengan lintas sektor seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bulungan kolaborasi dengan akademisi berupa Universitas Kalimantan Utara (Kaltara). "Termasuk dilibatkan tim teknis dalam penyusunan kajian resiko bencana ini," ungkap Syarwani.

Sosialisasi dan internalisasi turut menghadirkan narasumber lainnya, yaitu Direktur Teknis Pemetaan dan Evaluasi Resiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Pusat Kebijakan

Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

Syarwani melanjutkan, dokumen KRB dan Sistem Informasi Bencana Berbasis Web Kabupaten Bulungan Tahun 2023, nantinya akan menjadi sebuah produk hukum berupa peraturan Bupati Bulungan.

"Ada beberapa dokumen yang wajib disusun, di antaranya kajian resiko bencana, peta rawan bencana, rencana kontijensi dan rencana darurat," terangnya.

Sementara, Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) Tanjung Selor, Tanjung Harapan, mendeteksi adanya spot karhutla di Kaltara sepanjang tahun 2023.

Namun, untuk wilayah Kalimantan paling banyak dan mendominasi itu ada di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

Di Kalimantan Tengah terhitung mulai 1 Januari hingga 6 Oktober 2023, telah terdeteksi ada 20.013 total hotspot. Kategori Low 787 titik dan Medium 18.834 titik, High 383 titik.

Sedangkan, untuk wilayah Kali-

mantan Selatan dari rentang waktu yang sama, hingga Jumat 6 Oktober 2023, telah terdeteksi ada 13.934 total hotspot. Kategori Low 1.032 titik. Medium 12.669 titik, High 233 titik.

Sementara, di Kalimantan Timur kurun waktu yang sama, telah terdeteksi ada 9.998 total hotspot. Kategori Low, 257 titik. Medium, 9.603 titik dan High 138 titik.

"Paling banyak itu ada di Kalimantan Barat, terhitung tempo yang sama, terdeteksi ada 30.063 total hotspot, kategori low, 496 titik. Medium : 28.867 titik, dan high ada 700 titik," ujarnya.

Sementara di Kalimantan Utara (Kaltara) terhitung mulai Januari-Oktober 2023, telah terdeteksi ada 1.371 total hotspot, kategori Low 48 titik, medium, 1.311 titik dan high 12 titik.

"Namun untuk yang beberapa hari ini, asap sampai di Kaltara itu kiriman dari wilayah Kalteng dan Kalsel. Hal itu mengikuti arah angin, dari Selatan ke Utara," tutupnya. (tin/and)

Editor: Andhika



Kajian risiko bencana, Pemkab Bulungan harap memberikan manfaat bagi seluruh peserta.



Beberapa unit PMK yang dimiliki alami kerusakan dan perlu penambahan armada.

Unit PMK Bulungan Perlu Ditambah

TANJUNG SELOR - Usulan untuk peremajaan atau penambahan unit mobil Pemadam Kebakaran (PMK) Bulungan, hingga saat ini belum di-realisasikan.

Pasalnya, usulan itu telah beberapa kali disampaikan ke pemerintah daerah, namun karena keterbatasan anggaran sehingga usulan tersebut belum bisa diimplementasikan. Beberapa yang beroperasi saat ini, kondisinya tidak lagi prima serta perlu perbaikan.

"Kalau kita, inginnya dilakukan perbaikan. Terhadap kendaraan yang ada saat ini, mengingat usianya saat ini telah memasuki 15-20 tahun. Usianya tidak lagi, sehingga perlu adanya pemeliharaan," ujar Kepala Bidang (Kabid) Pemadam Kebakaran, M Amin Wiryono.

Dia menambahkan, meskipun saat ini armada yang ada tetap digunakan, namun tidak menutup kemungkinan performanya kurang dibandingkan dengan yang masih kategori prima.

"Kendaraan lama ini, tidak bisa kita paksakan untuk meningkatkan performanya. Karena dari sisi usia memang sudah tua," imbuhnya.

Adapun, untuk jumlah yang ada saat ini, PMK Bulungan sediakan

10 unit. Semuanya tetap beroperasi meskipun rerata performanya tidak semaksimal kendaraan yang baru.

Berbicara soal kecukupan armada PMK Bulungan, sambung dia dengan akses geografis dan kebutuhan tentu belum tergolong mumpuni. Tentunya jumlah itu masih sangat kurang, karena kalau berbicara ideal mestinya satu unit bisa melayani enam sampai tujuh orang.

"Yang kita punya saat ini ada 10 armada, kalau dikalikan satu armada, melayani 7 orang, dengan armada yang ada saat ini, baru bisa layani 70 orang. Kemudian dikalikan dengan jumlah shif, itulah kebutuhan dalam satu kantor," jelasnya.

Dia menyebut, kebutuhan mobil PMK Bulungan saat ini dengan jenis tangki. Artinya, pada saat kebakaran water truk itu hanya posisi pada titik api. Sedangkan mobil tangki yang suplai memberikan air dan jangan sampai putus, sementara yang ada saat ini, begitu air satu truk habis. Agak sulit keluar, apalagi ketika kebakaran pada areal yang aksesnya sempit.

"Mobil tangki yang kita punya saat ini baru ada tiga unit, dua unitnya ada di Kecamatan Tanjung Palas, kita

back-up dulu di sana, karena itu masih masuk dalam wilayah kerja kita," terangnya.

Wilayah kecamatan Tanjung Selor, saat ini, masih mencakup wilayah kerja Tanjung Palas. Pada prinsipnya, selagi itu bisa dilewati penanganan kebakaran saling membackup.

Dari 10 Kecamatan di Bulungan, belum sepenuhnya memiliki armada. Kecamatan yang telah disediakan armada seperti di Kecamatan Bunyu dan Tanjung Palas.

"Selebihnya masih kosong, dan kita usulkan semoga setiap kecamatan di Bulungan disediakan armada PMK," harapnya.

Jika dikatakan ideal, mestinya setiap satu Kecamatan harus ada Mobil PMK. Namun, untuk di Bulungan masih sangat jauh dari kata ideal. Apalagi, saat ini belum ada mobil pemadam yang sifatnya mobile.

"Kalau usulan, setiap tahun kita suarakan. Soal penambahan unit mobil PMK. Namun, hingga saat ini masih nihil dari kata realisasi," pungkasnya. (tin/and)

Editor: Andhika



Rencana DOB Kota Tanjung Selor Terkendala Moratorium

Jelang Hut Kabupaten Bulungan ke Berusia 63 Tahun

TANJUNG SELOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan, menanggapi mengenai rencana pemindahan ibu kota Kabupaten Bulungan, seiring dengan rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor.

Rencana tersebut, sebenarnya sudah digaungkan sejak lama. Namun, sejauh ini masih mimim realisasi. Pasalnya, kendala yang dihadapi pemerintah daerah berkaitan dengan moratorium.

Wakil Ketua II DPRD Bulungan, Hamka, mengatakan untuk kajian sejauh ini belum dilaksanakan. Tapi, kalau secara kasatmata pemindahan ibu Kota Bulungan cocoknya di Kecamatan Tanjung Palas.

Hal itu, berkaca dari luas wilayah, kemudian kesiapan infrastruktur serta pertimbangan alur historis terbentuknya Kabupaten Bulungan.

“Rencana ini memang perlu pembahasan yang kompeherensif, karena, tidak hanya sekadar pemindahan Kota Kecamatan, tapi sejauh mana kemampuan anggaran, pemerintah dan aspek penting terkait lainnya,” ucap Hamka, saat dikonfirmasi wartawan, beberapa waktu lalu.

Soal rencana pemindahan ibu Kota Kabupaten Bulungan, politisi PDIP ini menyarankan kalau bisa di Kecamatan Tanjung Palas. Banyak faktor yang menjadi pertimbangan, selain kesiapan infrastruktur juga lahan yang luas. “Alur sejarah terbentuknya Kabupaten Bulungan juga dari Kesultanan yang ada di Tanjung Palas,” jelasnya.

DPRD Bulungan, kata dia memang belum membahasnya soal itu secara intens. Namun, melihat dari alur sejarah pembentukan Kabupaten Bulungan itu muasalnya dari Tanjung Palas. Ini

yang akan terus dikembangkan karena merupakan saksi sejarah.

Pembahasan, dilakukan dengan tahap demi tahap. Karena harus pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) terlebih dahulu. Adapun, usulan untuk anggaran perencanaan itu, pihaknya mengikuti sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Soal anggaran, disesuaikan dengan rencana awal yang tertuang dalam RPJMD,” tuturnya.

Karena memang, kata dia mengenai spesifikasi anggaran terhadap rencana tersebut belum pernah di bahas bersama DPRD. “Iya, belum pernah dibahas. Pada intinya, kita sesuaikan dengan RPJMD dan kemampuan APBD pemerintah daerah,” tandasnya. (tin/and)

Editor: Andhika



ADE/MKR

Musprov SMSI Kaltara ke-1 yang digelar di Hotel Crown.

Buka Musprov SMSI Kaltara ke-1, Bustan Minta Media Sajikan Informasi Akurat dan Objektif

TARAKAN - Mewakili Gubernur, Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltara, Bustan, membuka secara resmi Musyawarah ke-1 Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Kaltara. Musprov ini digelar di Hotel Crown, Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Jumat (6/10/2023) siang tadi.

Menurutnya, di era digital seperti saat ini, Informasi dapat menyebar dengan cepat sehingga menciptakan peluang berbagai pengetahuan, gagasan dan pandangan dari berbagai sudut pandang.

Sebagai salah satu asosiasi media yang diakui dewan pers, lanjut Bustan, SMSI memiliki tanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan objektif. "Namun juga menjaga integritas dan etika profesi jurnalistik. Tanggung jawab itu harus tetap menjadi pedoman SMSI," ucapnya saat membaca sambutan Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang di Hotel Crown Tanjung Selor, Jumat (6/10/2023).

Di tengah arus informasi yang begitu cepat, Pemprov Kaltara terus berupaya meminimalisir dampak dari berita hoax, salah satunya dengan meningkatkan literasi kepada masyarakat.

Kendati demikian, menurutnya,

medialah yang memiliki peranan paling penting dalam menyajikan pemberitaan yang jernih, edukatif dan berkualitas. Untuk itu, dia berharap media mampu menyajikan informasi yang terpercaya.

"Media merupakan arus utama informasi maka media harus menjadi rumah penjernih informasi sehingga dapat menyajikan informasi yang terverifikasi, terpercaya, serta berperan mengaplikasikan kebenaran dan menyikap fakta," katanya.

Dia berharap melalui Musprov SMSI Kaltara ini dapat menghasilkan pengurus yang dapat membuat program kerja berkualitas. Tentunya, yang memberi dampak positif tidak hanya pada organisasi internal namun juga kepada Pemerintah Daerah.

"Selamat dan sukses atasterseleng-

garanya Musprov SMSI. Semoga pengurus yang terpilih dapat membuat program kerja yang memberikan dampak positif bukan hanya pada organisasi SMSI tapi juga untuk bangsa Indonesia dan kemajuan Pemprov Kaltara," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Musprov SMSI Kaltara, Victor mengatakan, kegiatan ini berlangsung selama dua hari mulai 6 hingga 7 Oktober 2023. Pada Jumat (6/10/2023) dilakukan pemilihan Ketua SMSI Kaltara dilanjut dengan besok pelantikan pengurus terpilih. Adapun peserta yang hadir sekitar 30 orang yang berasal dari berbagai media online di Kaltara. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika

